

**PENGARUH KEBIJAKAN PENYUSUTAN ASET TETAP BERWUJUD
TERHADAP EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK**

Skripsi

Telah disidangkan
Pada Hari: Sabtu Tanggal: 3 November 2012

Anggita Anggraeni
022108084

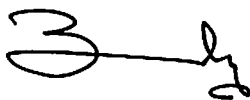
Menyetujui

Dosen Penilai,



(Fazariah Mahruzar, MM., Dra., Ak.)

Pembimbing,



(Buntoro Heri Prasetyo, MM., SE., Ak.)

Co Pembimbing,



(Patar Simamora, M.Si., SE.)

ABSTRAK

ANGGITA ANGGRAENI. NPM: 022108084. Pengaruh Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Berwujud Terhadap Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Dibawah bimbingan: BUNTORO HERI PRASETYO dan PATAR SIMAMORA.

Kebijakan pemilihan metode penyusutan aset tetap pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk dengan menggunakan metode garis lurus, sehingga beban pajak penghasilan setiap tahunnya mengalami peningkatan dan laba perusahaan akan menjadi relatif lebih besar. Hal ini mengakibatkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih besar pula.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan penyusutan aset tetap berwujud yang diterapkan pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, Untuk mengetahui beban Pajak Penghasilan Badan dan untuk mengetahui pengaruh kebijakan penyusutan aset tetap berwujud terhadap Pajak Penghasilan Badan pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan studi kasus dengan unit analisis berupa organisasi, yaitu sumber data yang merupakan respon dari divisi organisasi pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif untuk menghitung penyusutan aset tetap berdasarkan perpajakan dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, saldo menurun, nilai sekarang (*present value*), dan tarif Pajak Penghasilan Badan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh kebijakan penyusutan aset tetap berwujud terhadap penentuan metode garis lurus dan metode saldo menurun dalam menentukan efisiensi beban pajak penghasilan pada perusahaan, karena penyusutan merupakan beban pengurang bruto yang menentukan besar kecilnya laba kena pajak. Dalam hal penyusutan penggunaan metode saldo menurun sebagai metode penyusutan aktiva tetap di perusahaan akan jauh lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode garis lurus. Setelah dihitung kembali dengan metode penyusutan saldo menurun, persentase penghematan pajak pada perusahaan adalah pada tahun 2008 sebesar 21,2% dengan jumlah penghematan pajak sebesar Rp 3.822.740.110, pada tahun 2009 sebesar 30,5% dengan jumlah penghematan pajak sebesar Rp 7.126.077.811, pada tahun 2010 sebesar 21,9% dengan jumlah penghematan pajak sebesar Rp 7.652.149.895, dan pada tahun 2011 sebesar 20,5% dengan jumlah penghematan pajak sebesar Rp 8.026.755.998.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi hidayah, rahmat, serta kekuatan-Nya untuk selalu membimbing kita agar tetap berpegang pada tali-Nya. Solawat serta salam kita panjatkan untuk junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW.

Alhamdulillah bahwasanya penulis dapat menyusun skripsi dengan spesifikasi Akuntansi Perpajakan “Pengaruh Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Berwujud Terhadap Efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk”.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan, sehingga terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Buntoro Heri Prasetyo, MM., SE., Ak. selaku Pembimbing utama dan Bapak Patar Simamora, M.Si., SE. selaku Co. Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, Ak., SE., MM. CFr. A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
3. Bapak Dr. Yohanes Indrayono, Ak., SE., MM. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
4. Ibu Ellyn Octaviany, SE., MM. selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
5. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha beserta Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.

6. Kedua Orang Tua tercinta, papah, mamah, dan adiku yang senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil serta doanya kepada penulis.
7. Sandi Bagus Satriyo terima kasih atas dukungan dan doanya yang senantiasa meluangkan waktu untuk dapat membantu penulis menyelesaikan skripsi.
8. Teman-teman Jurusan Akuntansi Angkatan 2008 khususnya Ovit, Sri, Irma, dan Ayumi yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Sangat disadari oleh penulis bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan karena kesalahan dan ketidaksempurnaan yang ada pada setiap diri manusia. Untuk itu sangat diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sekalian.

Semoga skripsi ini menjadi jalan kebaikan bagi yang membacanya. Dan semoga Allah Swt selalu membimbing setiap gerak langkah kita, selalu memautkan hati kita untuk mencapai keridoan-Nya.

November 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Hal

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1. Maksud Penelitian.....	4
1.3.2. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian	6
1.5.1. Kerangka Pemikiran	6
1.5.2. Paradigma Penelitian	11
1.6. Hipotesis Penelitian.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Aset Tetap.....	13
2.1.1. Pengertian Aset Tetap	13
2.1.2. Klasifikasi Aset Tetap	14
2.1.3. Karakteristik Aset Tetap.....	15
2.1.4. Perolehan Aset Tetap.....	16
2.1.5. Persyaratan Aset Tetap.....	18
2.2. Penyusutan Aset Tetap	19
2.2.1. Pengertian Penyusutan	19
2.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan.....	20
2.2.3. Metode Penyusutan Aset Tetap.....	21
2.2.4. Metode Present Value	25
2.2.5. Manfaat Ekonomis dan Tarif Penyusutan	26
2.3. Pajak Penghasilan.....	28
2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	28
2.3.2. Subjek Pajak Penghasilan Badan	29
2.3.3. Objek Pajak Penghasilan Badan.....	30
2.3.4. Penghasilan Bruto	33
2.3.5. Tarif Pajak Penghasilan.....	35
2.3.6. Strategi Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan	37

2.4. Pengaruh Kebijakan Penyusutan Aset Tetap terhadap Efisiensi Pajak Penghasilan Badan	39
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1. Objek Penelitian	41
3.2. Metode Penelitian	42
3.2.1. Desain Penelitian	42
3.2.2. Operasionalisasi Variabel.....	43
3.2.3. Prosedur Pengumpulan Data	45
3.2.4. Metode Analisis	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Perusahaan	50
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.....	50
4.1.2. Struktur Organisasi, Wewenang, dan Tanggung Jawab.....	51
4.1.3. Bidang dan Kegiatan Usaha PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.....	56
4.2. Isi Pembahasan.....	57
4.2.1. Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Ketentuan Perpajakan Pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	57
4.2.2. Pengelompokan Harta Berwujud Bukan Bangunan	61
4.2.2.1. Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Ketentuan Perpajakan Dengan Metode Garis Lurus	62
4.2.2.2. Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Ketentuan Perpajakan Dengan Metode Saldo Menurun.....	67
4.2.3. Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.....	71
4.2.4. Pengaruh Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Berwujud terhadap Efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	76
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan	82
5.2. Saran	83
JADWAL PENELITIAN	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Akumulasi Penyusutan Aset Tetap PT Nippon Indosari Corpindo Tbk Tahun 2008-2011	2
Tabel 2 : Beban Pajak Penghasilan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk Tahun 2008-2011	3
Tabel 3 : Tarif Penyusutan Aset Tetap Berwujud berdasarkan Pengelompokkannya	27
Tabel 4 : Operasionalisasi Variabel	44
Tabel 5 : Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, Reklasifikasi dan Saldo Akhir Aset Tetap Tahun 2008	58
Tabel 6 : Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, Reklasifikasi dan Saldo Akhir Aset Tetap Tahun 2009	59
Tabel 7 : Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, Reklasifikasi dan Saldo Akhir Aset Tetap Tahun 2010	60
Tabel 8 : Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, Reklasifikasi dan Saldo Akhir Aset Tetap Tahun 2011	61
Tabel 9 : Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan Metode Garis Lurus Tahun 2008	64
Tabel 10 : Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan Metode Garis Lurus Tahun 2009	65
Tabel 11 : Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan Metode Garis Lurus Tahun 2010	66
Tabel 12 : Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan Metode Garis Lurus Tahun 2011	67
Tabel 13 : Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan Metode Saldo Menurun Tahun 2008	68
Tabel 14 : Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan Metode Saldo Menurun Tahun 2009	69
Tabel 15 : Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan Metode Saldo Menurun Tahun 2010	70

Tabel 16 : Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan Metode Saldo Menurun Tahun 2011	71
Tabel 17 : Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara Metode Garis Lurus Dan Saldo Menurun Dengan Present Value tahun 2008	72
Tabel 18 : Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara Metode Garis Lurus Dan Saldo Menurun Dengan Present Value tahun 2009	73
Tabel 19 : Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara Metode Garis Lurus Dan Saldo Menurun Dengan Present Value tahun 2010	74
Tabel 20 : Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara Metode Garis Lurus Dan Saldo Menurun Dengan Present Value tahun 2011	75
Tabel 21 : Beban Pajak PT Nippon Indosari Corpindo Tbk Tahun 2008 sampai 2011	76
Tabel 22 : Perbandingan Metode Garis Lurus Dan Saldo Menurun Dengan Present Value dan Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 sampai 2011	78
Tabel 23 : Persentase Penghematan Terhadap Pajak PT Nippon Indosari Corpindo Tbk Tahun 2008 sampai dengan 2011	80

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 : Paradigma Penelitian.....	11

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Penyusutan Aset Tetap dengan Metode Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun PT Nippon Indosari Corpindo Tbk Tahun 2008**

- Lampiran 2 : Perbandingan Beban Penyusutan Aset Tetap antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan Present Value Tahun 2008**

- Lampiran 3 : Penyusutan Aset Tetap dengan Metode Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun PT Nippon Indosari Corpindo Tbk Tahun 2009**

- Lampiran 4 : Perbandingan Beban Penyusutan Aset Tetap antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan Present Value Tahun 2009**

- Lampiran 5 : Penyusutan Aset Tetap dengan Metode Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun PT Nippon Indosari Corpindo Tbk Tahun 2010**

- Lampiran 6 : Perbandingan Beban Penyusutan Aset Tetap antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan Present Value Tahun 2010**

- Lampiran 7 : Penyusutan Aset Tetap dengan Metode Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun PT Nippon Indosari Corpindo Tbk Tahun 2011**

- Lampiran 8 : Perbandingan Beban Penyusutan Aset Tetap antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan Present Value Tahun 2011**

- Lampiran 9 : Tabel Discount Factor**

- Lampiran 10: Struktur Organisasi Perusahaan**

- Lampiran 11: Laporan Keuangan Aset Tetap dan Perpajakan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk Tahun 2008 sampai 2009**

- Lampiran 12: Laporan Keuangan Aset Tetap dan Perpajakan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk Tahun 2010 sampai 2011**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Aset tetap ialah salah satu harta yang dimiliki perusahaan dan nilainya cukup besar guna menunjang kelancaran aktivitas operasional dalam mencapai tujuannya. Aset tetap dapat berupa mesin, gedung, tanah dan kendaraan dan peralatan lainnya. Aset tetap merupakan komponen terbesar dibandingkan dengan akun lainnya secara keseluruhan, terkadang menyebabkan perlunya suatu pengelolaan dan kebijakan khusus, baik dalam penggunaan, penguasaan, pemeliharaan, maupun pencatatan akuntansinya, sehingga nilai aset tetap yang tercatat dalam laporan keuangan dapat memberikan informasi yang handal mengenai kekayaan perusahaan.

Aset tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai dengan dibangun terlebih dahulu untuk digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun PSAK No. 16 tahun 2009. Masa manfaat merupakan periode aset tetap diharapkan dapat digunakan perusahaan, atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset.

Aset terdiri komponen keuangan seperti kas, piutang, dan investasi pada instrumen keuangan. Aset juga terdiri biaya yang diharapkan akan memberikan masa manfaat ekonomi masa depan. Beberapa aset diukur dengan biaya penggantian (*replecement cost*), nilai pasar (*market value*),

nilai bersih yang dapat direalisasi bersih (*net realizable value*), atau nilai sekarang yang didiskontokan (*discounted present value*).

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk adalah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk memenuhi permintaan pasar, dengan menghasilkan produk makanan berupa roti. Pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk terdapat aset tetap yang dimiliki perusahaan, adapun biaya perolehan aset tetap dalam kurun waktu empat tahun seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.
Per 31 Desember

Biaya Perolehan	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Bangunan	46.292.894.131	77.182.265.063	80.504.278.612	98.649.370.363
Mesin dan Peralatan	85.810.552.074	139.938.261.305	148.940.589.015	204.748.391.468
Alat Pengangkutan	8.091.184.550	9.815.274.550	10.552.311.826	11.391.121.371
Perabot dan Peralatan kantor	8.608.191.967	10.572.598.462	12.252.329.103	15.917.619.105

(Sumber: PT Nippon Indosari Corpindo Tbk)

Pada akumulasi penyusutan aset tetap pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk terlihat adanya peningkatan jumlah penyusutan pada aset setiap tahunnya mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Kebijakan dalam penyusutan aset tetap berwujud tersebut diterapkan oleh PT Nippon Indosari Corpindo Tbk dengan menggunakan metode garis lurus. Karena, dalam perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus, nilai penyusutan tiap tahunnya akan sama.

Sedangkan beban pajak penghasilan yang terdapat pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk dalam kurun waktu empat tahun adalah sebagai berikut.

Tabel 2.
Beban Pajak Penghasilan
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.
Per 31 Desember

No.	Tahun	Beban Pajak Penghasilan
1.	2008	18.013.019.739
2.	2009	23.376.323.070
3.	2010	34.890.849.054
4.	2011	39.015.501.244

(Sumber: PT Nippon Indosari Corpindo Tbk)

Pada tabel diatas beban pajak penghasilan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk mengalami peningkatan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, hal ini dapat disebabkan karena adanya kebijakan penggunaan metode garis lurus pada perhitungan penyusutan aset tetap di perusahaan. Karena jumlah beban penyusutan meningkat setiap tahunnya, sehingga laba perusahaan akan menjadi relatif lebih besar. Hal ini mengakibatkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih besar pula.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mempelajari lebih dalam masalah penentuan atau pemilihan metode penyusutan aset tetap dan mencari jalan keluar terkait dengan kebijakan penyusutan aset tetap

berwujud menurut Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sehubungan dengan tujuan tersebut, maka dari itu penulis mengambil judul "Pengaruh Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Berwujud terhadap Efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk."

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Penulis merumuskan masalah yang terjadi pada perusahaan yaitu beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk belum efisien disebabkan perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk semua aset tetapnya.

Untuk memberikan arah dan batasan pembahasan, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan penyusutan aset tetap berwujud yang ditempuh pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk ?
2. Apakah beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk sudah efisien?
3. Bagaimana pengaruh kebijakan penyusutan aset tetap berwujud terhadap Pajak Penghasilan Badan pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai kebijakan penyusutan aset tetap berwujud serta

pengaruhnya terhadap Pajak Penghasilan Badan, dan sebagai bahan penyusunan skripsi.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan penyusutan aset tetap berwujud yang diterapkan pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.
2. Untuk mengetahui beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.
3. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan penyusutan aset tetap berwujud terhadap Pajak Penghasilan Badan pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini dapat bermanfaat dan diharapkan digunakan, terutama sebagai:

1. Kegunaan Teoretis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan penulis dalam mengembangkan ilmu yang dimiliki serta sebagai suatu bentuk perbandingan antara teori dan aplikasinya di masyarakat.

b. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan pembaca mengenai kebijakan penyusutan aset tetap berwujud menurut Peraturan Perpajakan dan mengetahui pengaruhnya terhadap Pajak Penghasilan Badan, serta dapat dijadikan suatu gambaran bagi peneliti lainnya dalam penulisan masalah yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat serta sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen PT Nippon Indosari Corpindo Tbk dalam menetapkan kebijakan penyusutan aset tetap berwujud agar Pajak Penghasilan Badannya menjadi lebih efisien di masa mendatang.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Berbicara mengenai aktiva tetap tidak terlepas dari kebijakan dan metode penyusutan. Hal ini tergantung dari kebijakan perusahaan yang bersangkutan. Kebijakan aktiva tetap harus sesuai dengan kondisi perusahaan dan gambaran yang wajar mengenai hasil operasi perusahaan yang akan mempengaruhi kewajaran dalam laporan keuangan perusahaan tersebut secara keseluruhan.

Lubis (2009, 52) Aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam

rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, seperti tanah, bangunan, mesin, perlengkapan, ongkos pemasangan, dan sebagainya.

Pemilihan metode penyusutan harus tepat dan perlu diadakan analisis terhadap metode penyusutan yang diterapkan perusahaan dalam aktiva tetapnya. Wajib pajak bebas memilih dan menggunakan salah satu metode tersebut namun harus taat asas (Lubis, 2009, 69). Masalah penyusutan merupakan masalah yang penting selama masa pemanfaatan aset tetap.

Penyusutan dapat diartikan sebagai alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva sepanjang masa manfaat atau proses harga menjadi (*cost allocation*), sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha (Lubis, 2009, 66).

Adapun didalam Undang-undang PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 11 penyusutan merupakan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta berwujud.

Sesuai Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, pembagian, atau perubahan aset berwujud (kecuali tanah) yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar masa manfaat yang telah ditentukan bagi aset tersebut.

Adapun tiga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan berapa besar beban penyusutan setiap periode adalah harga perolehan (*cost*), nilai sisa (*residu*) dan taksiran umur ekonomis (Lubis, 2009,66).

Pemilihan metode penyusutan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun dapat diketahui perbedaannya dalam biaya penyusutan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Demikian pula dari sudut pandang *time value of money*, jika kita hitung dalam nilai tunai (*present value*) dengan *discount factor* tertentu misalnya 20%, maka nilai akumulasi kedua metode tersebut tidak akan sama, sehingga dapat terlihat didalam menghitung dan membukukan biaya penyusutan akan menguntungkan atau tidaknya dari segi penghematan beban pajak (Erly Suandy, 2008, 48).

Nilai sekarang (*present value*) adalah nilai sekarang atas jumlah tertentu di masa depan (Keown Arthur dan John Martin, 2008, 153).

Perusahaan harus mampu menerapkan metode penyusutan dengan benar pada aktiva tertentu, karena metode penyusutan yang berbeda akan menghasilkan alokasi biaya penyusutan yang berbeda sehingga akan mempengaruhi harga pokok penjualan dan beban usaha yang mempengaruhi besarnya laba yang akan diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, penyusutan juga dapat berpengaruh signifikan dalam

menentukan dan menyajikan posisi keuangan dari hasil usaha (Waluyo, 2008, 92).

Mengingat pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, maka perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak.

Manajemen Pajak merupakan strategi-strategi yang dilakukan perusahaan dalam mengoptimalkan penghematan kewajiban perpajakan. Strategi yang dimaksud merupakan usaha-usaha yang dirancang dengan matang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam rangka penghematan beban pajak (Lubis, 2009, 35). Strategi yang biasa dilakukan mengatur biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Karena biaya tersebut oleh perusahaan memiliki banyak peluang untuk diminimalkan.

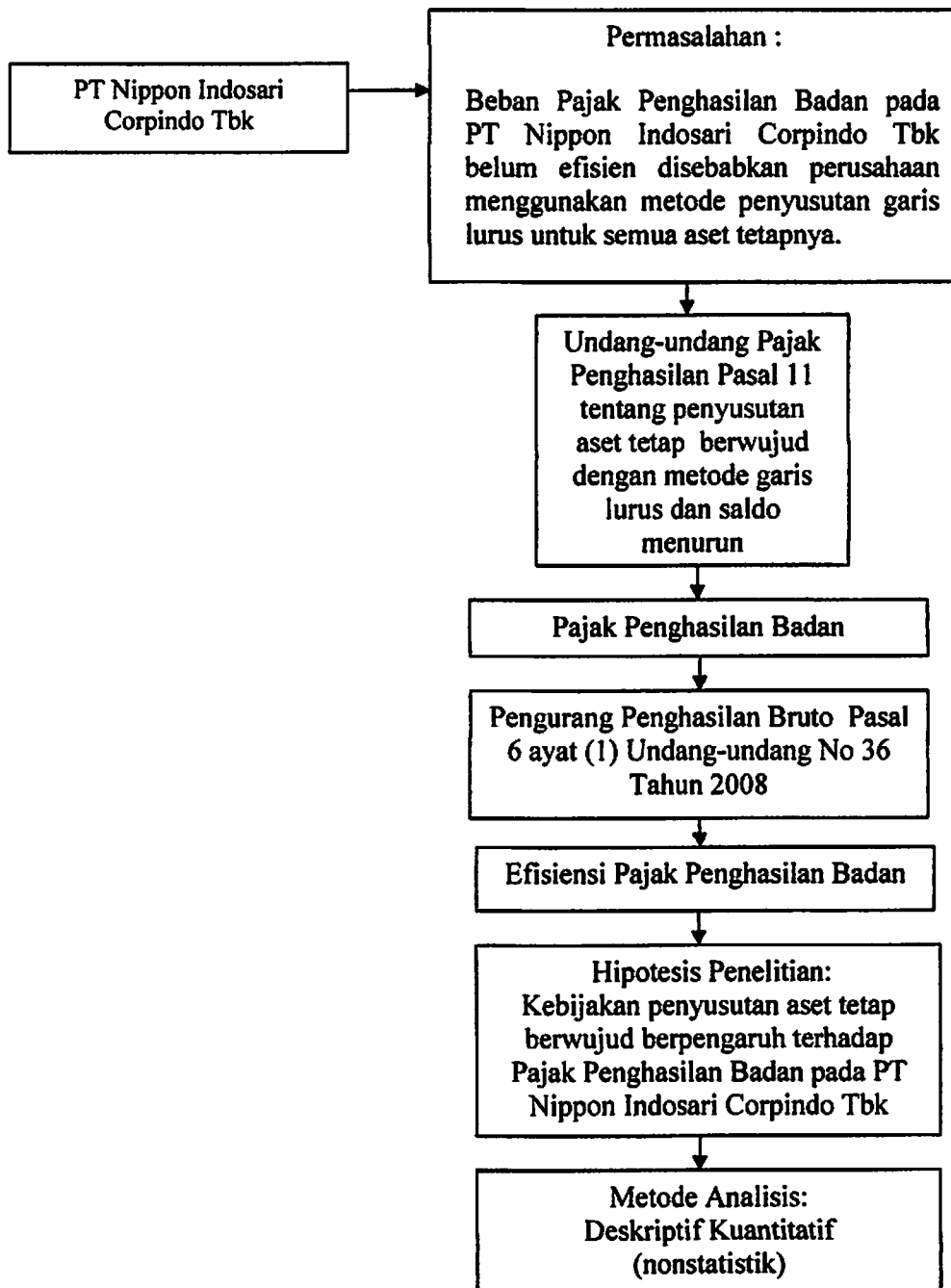
Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, merupakan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (Waluyo, 2009, 237).

Sedangkan menurut Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, salah satunya berdasarkan penghasilan bruto dikurangi penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Besarnya PPh Terutang atas penghasilan Wajib Pajak maupun PPh Terutang atas penghasilan dari pihak lain atas transaksi yang berkaitan dengan Wajib Pajak, dihitung menggunakan tarif PPh yang diatur dalam Undang-undang PPh Pasal 17 (Waluyo, 2010, 111).

Penentuan metode penyusutan secara tepat penting untuk dilakukan perusahaan dalam mencapai efisiensi beban pajak, terutama untuk perusahaan yang padat modal. Adapun strategi yang dapat digunakan untuk mengefisiensikan beban PPh Badan menurut Erly Suandy (2008,121) salah satunya adalah dengan pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud.

1.5.2. Paradigma Penelitian



Gambar 1.
Paradigma Penelitian

1.6. Hipotesis Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan hipotesis, yaitu jawaban bersifat sementara dari permasalahan yang memerlukan pengujian lebih lanjut dari permasalahan yang diteliti secara empiris. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Kebijakan penyusutan aset tetap berwujud yang diterapkan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
2. Pajak Penghasilan Badan pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk belum efisien.
3. Kebijakan penyusutan aset tetap berwujud berpengaruh terhadap efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Aset Tetap

Untuk menjalankan kegiatan operasional usahanya setiap perusahaan harus mempunyai aset tetap. Aset tetap digunakan untuk membantu perusahaan dalam menghasilkan produksi, tanpa aset tetap perusahaan tidak dapat menghasilkan barang yang dapat dijual. Aset tetap dapat berupa aset tetap berwujud seperti tanah, bangunan atau gedung, mesin, peralatan, dan lain-lain. Sedangkan aset tidak berwujud seperti *goodwill*, merk dagang, paten, hak cipta, *franchise*, biaya pendirian organisasi, dan lain-lain.

2.1.1. Pengertian Aset Tetap

Aset tetap merupakan bagian dari neraca yang dilaporkan oleh manajemen dalam setiap periode atau setiap tahun. Aset tetap merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam kegiatan normal perusahaan.

Menurut Lubis (2009, 52) berkenaan dengan aset tetap menyatakan bahwa:

Aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, seperti tanah, bangunan, mesin, perlengkapan, ongkos pemasangan, dan sebagainya.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.

16) menyatakan pengertian aset tetap adalah:

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan
2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

2.1.2. Klasifikasi Aset Tetap

Ketentuan perpajakan mengelompokkan aktiva tetap menjadi aktiva yang dapat disusutkan (*depreciable assets*; misalnya, bangunan, mesin, dan peralatan) dan yang tidak dapat disusutkan (*non depreciable assets*; misalnya, tanah)

Aset tetap dapat dikelompokkan berdasarkan sifat dan kegunaannya dalam operasional normal perusahaan, yaitu:

1. Aset tetap berwujud, terdiri: dari tanah, gedung, peralatan.
2. Aset tetap tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki wujud fisik, tidak dapat dilihat, dan dipegang. yang termasuk aset tidak berwujud adalah hak cipta, hak paten, hak waralaba, daftar pelanggan, merek dagang dan *goodwill*.
(Waluyo, 2009, 171)

Menurut Gunadi (2008, 47) menyatakan bahwa “Penggolongan aset tetap menjadi dua bagian, yaitu aset tetap bangunan dan aset tetap bukan bangunan”.

Untuk tujuan penyusutan pada aktiva, ketentuan perpajakan mengelompokkan aktiva menjadi bangunan dan bukan bangunan yaitu:

1. Kelompok bukan Bangunan
 - a. Aktiva kelompok 1 merupakan aktiva yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 4 tahun.

- b. Aktiva kelompok 2 merupakan aktiva yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 8 tahun.
 - c. Aktiva kelompok 3 merupakan aktiva yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 16 tahun.
 - d. Aktiva kelompok 4 merupakan aktiva yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 20 tahun.
2. Kelompok Bangunan
- a. Bangunan permanen merupakan aktiva yang mempunyai masa manfaat 20 tahun.
 - b. Bangunan tidak permanen merupakan aktiva yang mempunyai masa manfaat 10 tahun.
- (Gunadi, 2009, 84).

2.1.3. Karakteristik Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset perusahaan yang tidak diperjual belikan, melainkan untuk dipergunakan dalam kegiatan aktivitas operasional perusahaan yang umurnya lebih dari 1 (satu) tahun atau lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Adapun aset tetap menurut perpajakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Dimiliki dan digunakan dalam usaha atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dengan suatu masa manfaat yang lebih dari setahun.
2. Tidak dimaksud untuk dijual dalam kegiatan normal. (Johannes Yahya, 2010, 104).

Selain itu karakteristik aset yang dapat disusutkan antara lain adalah:

1. Digunakan dalam kegiatan usaha.
2. Nilainya berturun secara bertahap beberapa aktiva yang tidak dapat disusutkan karena nilainya yang tidak menurun adalah tanah, aktiva pendanaan, barang dagangan dan persediaan.
3. Disusutkan jika masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
4. Pihak yang berhak melakukan penyusutan adalah:
 - a. Pihak yang menggunakan aktiva tetap tersebut dalam melakukan kegiatan usaha.

- b. Pemilik, dapat dibagi menjadi legal owner dan beneficial owner.
(<http://www.sarjanaku.com/2012/07/pengertian-aktiva-tetap-penggolongan.html>).

2.1.4. Perolehan Aset Tetap

Penyusutan menurut fiskal tidak mempertimbangkan nilai sisa (*residual value*), sehingga seluruh harga perolehan dibebankan dalam penyusutan. Aset tetap berwujud dapat diperoleh dengan berbagai cara, di mana masing-masing cara perolehan aset tetap berwujud mempengaruhi penentuan harga perolehan. Cara-cara tersebut antara lain:

1. Perolehan aset tetap secara gabungan. Apabila aset diperoleh secara gabungan, maka harga perolehan masing-masing aset tetap ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
2. Perolehan aset tetap secara angsuran. Cara yang pertukaran dapat dilakukan dengan cara pembelian angsuran ini bergantung pada perjanjian. Terdapat pula harga dengan angsuran ditetapkan terlebih dahulu dan angsuran yang harus dibayar setiap bulan tetap, maka setiap angsuran terdiri dua komponen, yaitu angsuran dan bunga. Besarnya bunga di setiap angsuran ditetapkan menggunakan tingkat bunga tetap (*flat interest rate*).
3. Perolehan aset tetap secara pertukaran. Menurut PSAK No. 16 Tahun 2009, suatu aset tetap dapat diperoleh dengan pertukaran atau pertukaran sebagian. Dalam pertukaran sebagian dapat dilakukan untuk suatu aset tetap yang tidak serupa aset lain. Biaya ini diukur pada nilai wajar aset yang dipertukarkan atau diperoleh, yang paling andal, sebanding dengan nilai wajar aset yang dipertukarkan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer. Aset yang diperoleh dari pertukaran melalui pertukaran dengan (1) Aset nonmoneter, baik dengan aset tetap yang sejenis atau aset tetap yang tidak sejenis, (2) Sekuritas berupa obligasi atau saham yang dikeluarkan oleh perusahaan sendiri atau emisi oleh badan lain.

Dalam pertukaran atau pertukaran sebagian untuk suatu aset tetap yang tidak serupa aset lain, biaya tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas atau diperoleh yang manakah yang lebih andal, ekuivalen dengan nilai wajar aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah nilai kas atau setara kas yang ditransfer. Selisih nilai adalah selisih antara nilai buku aset tetap yang lama dengan nilai perolehan yang baru.

Apabila aset tetap ditukar dengan aset tetap yang tidak sejenis harus diakui sebagai laba rugi. Sebaliknya apabila pertukaran aset yang sejenis, maka pengakuan laba rugi ditangguhkan sampai saat aset tetap yang baru dilepas kembali. Menurut PSAK No. 16 Tahun 2009, menyebutkan bahwa keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi.

Perlakuan Perpajakan diatur dalam pasal 10 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar (*market price*).

Peraturan perpajakan atas pertukaran aset tetap dengan saham diatur dalam pasal 10 ayat (5) Undang-undang Pajak Penghasilan bahwa apabila terjadi pengalihan harta termasuk setoran tunai yang diterima badan sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal, maka dasar penilaian harta bagi badan yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar harta tersebut.

4. Perolehan aset tetap dengan cara membangun sendiri. Perolehan aset tetap dengan cara membangun sendiri menggunakan prinsip, meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun aset sampai siap pakai. Biaya tidak langsung (*overhead cost*), efisiensi atau inefisiensi, dan bunga selama masa konstruksi juga termasuk dalam nilai aset tetap karena membangun sendiri. Demikian halnya biaya dan jumlah yang abnormal dari bahan baku yang tidak terpakai, tenaga kerja, sumber daya lain yang terjadi dalam memproduksi suatu aset yang dikonstruksi sendiri tidak dimasukkan dalam biaya perolehan, tetapi segera diakui sebagai kerugian pada tahun yang bersangkutan. Dari aspek perpajakan, perolehan aset tetap dengan cara membangun sendiri tersebut sebagai objek terutang Pajak Pertambahan Nilai.
5. Perolehan aset tetap secara hibah, bantuan dan sumbangan. Aset tetap yang diperoleh dari hadiah atau

donasi, pencatatannya bisa dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan. Untuk menerima hadiah mungkin dikeluarkan biaya-biaya, tetapi biaya-biaya tersebut jauh lebih kecil dari nilai aset tetap yang diterima, maka pencatatan yang dilakukan sebesar nilai pasar.

(Waluyo, 2009, 91)

Berdasarkan PSAK No. 16.5 menyatakan bahwa biaya perolehan adalah:

Jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Dalam PSAK No. 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika:

1. Besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal.

2.1.5. Persyaratan Aset Tetap

Pengaturan penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan diatur dalam pasal 11 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Dalam

pengaturan penyusutan tersebut mengandung maksud persyaratan aktiva yang dapat disusutkan dan metode penyusutannya.

Sedangkan persyaratan aset yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan meliputi:

1. Aset yang dapat disusutkan adalah aset berwujud,
2. Aset tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,
3. Aset tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Aset tetap yang menurut akuntansi dapat disusutkan, tetapi menurut akuntansi pajak tidak dapat disusutkan, antara lain:

1. Aset tetap perusahaan berupa kendaraan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai, termasuk juga yang ada di daerah terpencil, dan
2. Aset tetap perusahaan berupa rumah yang terletak bukan di daerah terpencil yang ditempati pegawai yang tidak diberi tunjangan oleh perusahaan.

(Waluyo, 2009, 101)

2.2. Penyusutan Aset Tetap

2.2.1. Pengertian Penyusutan

Berkurangnya kapasitas otomatis akan membuat nilai aset tetap berkurang. Sebagai unsur pengakuan atas penurunan aset tetap berwujud dialokasikan ke penyusutan (*depreciation*). Penyusutan aset tetap menimbulkan beban penyusutan yang dibebankan ke dalam laporan laba rugi setiap periode akuntansi.

Masalah penyusutan merupakan masalah yang penting selama masa pemanfaatan aset tetap. Menurut Lubis (2009, 66) menyatakan bahwa “Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva sepanjang masa manfaat”.

Adapun menurut Undang-undang No 36 Tahun 2008 Pasal 11

Ayat 1, penyusutan adalah:

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta berwujud.

Sesuai Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, pembagian, atau perubahan aset berwujud (kecuali tanah) yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar masa manfaat yang telah ditentukan bagi aset tersebut.

Penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud. Oleh karena itu, baik menurut akuntansi komersial maupun ketentuan perpajakan nilai aset tetap boleh dibebankan sekaligus sebagai biaya. Pembebanan aset tetap berwujud dilakukan melalui alokasi secara berangsur-angsur dengan cara penyusutan atau amortisasi, yaitu suatu proses untuk mengalokasikan harga perolehan aset tetap menjadi biaya selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

2.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan

Sesuai Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan,

pembagian, atau perubahan aset berwujud (kecuali tanah) yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, harus disusutkan karena secara nyata nilai aset yang dipakai dari tahun ke tahun kemampuan dalam memberikan manfaatnya menurun.

Adapun tiga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan berapa besar beban penyusutan setiap periode, antara lain yaitu:

1. Harga perolehan (*cost*)
 2. Nilai sisa (*residu*)
 3. Taksiran umur ekonomis.
- (Lubis, 2009,66)

2.2.3. Metode Penyusutan Aset Tetap

Dalam pembebanan penyusutan harus memperhatikan dasar yang digunakan. Apabila dasar penyusutan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal akan menghasilkan jumlah penyusutan yang sama, dengan asumsi menggunakan metode penyusutan yang sama. Menurut akuntansi komersial metode penyusutan yang dapat digunakan sebagai berikut:

1. Metode garis lurus adalah metode perhitungan depresiasi aktiva tetap dimana setiap periode akuntansi diberikan beban yang sama secara merata. Cara perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Depresiasi} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Taksiran Umur Ekonomis Aktiva}}$$

(Rudianto, 2008, 277)

2. Metode saldo menurun (*declining balance method*) menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur

manfaat aset. Dalam metode ini, besarnya biaya penyusutan semakin lama menjadi lebih kecil dari tahun ke tahun. Perhitungan biaya penyusutan dapat dirumuskan:

$$\begin{aligned} \text{Biaya Penyusutan} &= \text{Tarif Penyusutan} \times \text{Dasar Penyusutan} \\ \text{Dasar Penyusutan} &= \text{Harga Sisa Buku Awal Tahun} \end{aligned}$$

3. Metode jumlah unit (*sum of the unit method*) menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Dalam metode ini taksiran manfaat dinyatakan dengan kapasitas produksi yang dihasilkan. Perhitungan biaya penyusutannya dapat dirumuskan:

$$\begin{aligned} \text{Biaya Penyusutan} &= \text{Tarif Penyusutan} \times \text{Dasar Penyusutan} \\ \text{Dasar Penyusutan} &= \text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu} \\ \text{Tarif Penyusutan} &= \frac{\text{Produksi Sebenarnya}}{\text{Kapasitas Produksi}} \end{aligned}$$

(Waluyo, 2009, 102)

Sedangkan metode penyusutan aset yang diperbolehkan dalam ketentuan fiskal adalah sebagai berikut :

1. Metode garis lurus (*straight line method*) untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan.
2. Metode saldo menurun (*declining balance method*) untuk kelompok bukan bangunan saja, dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus (*closed ended*).
(Sukrisno dan Estralita, 2009, 104)

Adapun metode penyusutan dapat dikelompokkan menurut kriteria sebagai berikut:

1. Berdasarkan kriteria waktu.
 - a. Metode garis lurus (*straight line method*).
Dalam metode ini biaya penyusutan dibebankan secara merata keseluruhan umur taksiran aktiva tersebut. Jadi, penyusutan setia periode akan sama jumlahnya. Dimana penyusutan dilakukan berdasarkan bagian-bagian yang sama besarnya selama masa manfaat yang telah ditetapkan atas

aktiva tersebut. Biaya penyusutan menurut metode garis lurus:

$$D = \frac{C - S}{n}$$

atau

- D : biaya depresiasi (penyusutan).
 C : *cost* (harga perolehan).
 S : nilai residu.
 n : umur ekonomis atau masa manfaat.

b. Metode saldo menurun (*declining balance method*)

Penyusutan dilakukan berdasarkan bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menetapkan tarif penyusutan atas nilai buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa bukunya disusutkan sekaligus. Dalam metode ini biaya penyusutan dalam suatu periode diperoleh dari hasil perkalian antara tarif penyusutan dikalikan dengan nilai buku awal periode.

2. Berdasarkan kriteria penggunaan

a. Metode jam jasa (*service hours method*).

b. Metode jumlah unit produksi (*productive output method*).

Pada metode ini umur aktiva ditaksir berdasarkan kapasitas produksi seperti jam, mesin, kilometer atau jumlah pengoperasiannya. Biaya penyusutan pada suatu periode adalah sebesar jumlah unit yang dipergunakan dalam periode tersebut dikalikan dengan penyusutan per unit. Biaya penyusutan setiap periode akuntansi akan berbeda pada periode yang bersangkutan.

3. a. Metode berdasarkan kelompok dan komposit.

b. Metode anuitas.

(Lubis, 2009,67)

Untuk aset yang disusutkan harus dikelompokkan terlebih dahulu sesuai masa manfaat. Akuntansi komersial mengatur estimasi masa manfaat suatu aset yang dapat disusutkan dengan dasar pertimbangan yang biasanya didasarkan pengalaman dengan jenis aset yang serupa. Sedangkan Ketentuan Perpajakan untuk pengelompokan

aset tetap berdasarkan masa manfaat mengacu pada surat Keputusan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009.

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk aset yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan aset tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan aset tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan aset yang bersangkutan mulai menghasilkan. Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aset berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Pajak Penghasilan, maka dasar penyusutan untuk aset tetap adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aset tersebut.

Penyusutan dapat dipercepat untuk meningkatkan arus kas, karena jika penyusutannya besar, maka pajak yang dibayar lebih kecil dan pengembalian investasi (ROI) menjadi tinggi. Penyusutan fiskal termasuk penyusutan yang dipercepat karena masa manfaat fiskal lebih pendek dibanding masa manfaat komersial. Metode yang dapat digunakan antara lain:

1. Dipercepat (*accelerated*), misalnya dengan metode penyusutan saldo menurun atau menurun ganda (*declining/double declining balance*).
 2. Memperpendek umur (*shorted life*).
 3. Bebas (*arbitrary deduction*).
- (Erly Suandy, 2008, 29)

2.2.4. Metode Present Value

Metode ini telah memperhitungkan nilai waktu uang, dimana yang dipertimbangkan manajemen adalah besarnya selisih antara pendapatan diferensial dengan biaya diferensial serta dampak pajak penghasilan sebagai akibat dari adanya pendapatan diferensial dan biaya diferensial selama umur ekonomis aktiva tetap tersebut, kemudian dinilai tunaikan dengan tarif kembalian tertentu. Jumlah nilai tunai ini kemudian dibandingkan dengan aktiva diferensial untuk mempertimbangkan tidaknya tambahan aktiva tetap tersebut.

Adapun pengertian nilai sekarang (*present value*) menurut (Dermawan Sjahrial, 2008, 2) adalah “kita mengetahui nilai beberapa tahun yang akan datang untuk mengetahui berapa nilai sekarangnya”.

Berkenaan dengan nilai sekarang (*present value*) menurut (Keown Arthur dan John Martin, 2008, 153) adalah “nilai sekarang atas jumlah tertentu di masa depan”. Untuk menghitung nilai sekarang (PV) kita menghitungnya secara terbalik dengan nilai kemudian (FV) yaitu kita mengetahui nilai beberapa tahun yang akan datang untuk mengetahui berapa nilai sekarang.

Rumus yang digunakan untuk mencari nilai sekarang adalah dengan merubah rumus nilai kemudian (*Future Value*) yaitu:

$$PV = \frac{FV}{(1 + i)^n}$$

Istilah yang digunakan yaitu:

PV = Nilai sekarang (*Present Value*)

FV = Nilai yang akan datang (*Future Value*)

i = Bunga (i = *interest* atau suku bunga)
 n = Tahun
 (Dermawan Sjahrial, 2008,1)

2.2.5. Manfaat Ekonomis dan Tarif Penyusutan

Penyusutan yang dilakukan oleh Wajib Pajak pada umumnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, dibandingkan dengan Undang-undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya maka terdapat perbedaan dalam menentukan masa manfaatnya. Sebagaimana disebutkan dalam PSAK No. 16 Tahun 2009 tentang umur manfaat (*useful life*) adalah:

1. Suatu periode di mana aset diharapkan akan digunakan oleh entitas, atau
2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut oleh entitas.

Berkenaan dengan manfaat ekonomis menurut PSAK No. 16 paragraf 59 menyatakan bahwa “Manfaat ekonomis masa depan melekat pada aset yang dikonsumsi oleh entitas, terutama melalui penggunaan aset itu sendiri”. Namun beberapa faktor lain seperti keusangan teknis, keusangan komersial, dan keusangan selama aset tersebut tidak terpakai, sering mengakibatkan menurunnya manfaat ekonomis yang dapat diperoleh dari aset tersebut. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, seluruh faktor berikut ini diperhitungkan dalam PSAK No. 16 untuk menentukan umur manfaat dari setiap aset:

1. Prakiraan daya pakai dari aset yang bersangkutan. Daya pakai atau daya guna dinilai dengan merujuk pada prakiraan kapasitas atau kemampuan fisik aset untuk menghasilkan sesuatu,
2. Prakiraan tingkat keusangan fisik, tergantung pada faktor pengoperasian aset tersebut, seperti jumlah pergiliran (*shift*) penggunaan aset dan program

- pemeliharaan aset dan perawatannya serta perawatan dan pemeliharaan aset pada saat aset tersebut tidak digunakan (menggangu),
3. Keusangan teknis dan keusangan komersial yang diakibatkan perubahan atau peningkatan produksi, atau karena perubahan permintaan pasar atas produk atau jasa yang dihasilkan oleh aset tersebut, dan
 4. Pembatasan penggunaan aset karena aspek hukum atau peraturan tertentu, seperti berakhirnya waktu penggunaan sehubungan dengan sewa.

Umur manfaat aset ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan oleh entitas. Kebijakan manajemen aset suatu entitas dapat meliputi pelepasan aset yang bersangkutan setelah suatu waktu tertentu aset tersebut digunakan atau setelah bagian tertentu dari manfaat suatu aset dikonsumsi. Oleh karena itu, umur manfaat dari suatu aset merupakan hal yang membutuhkan pertimbangan berdasarkan pengalaman entitas terhadap aset yang serupa. Dalam menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud menurut perpajakan diatur Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dalam Pasal 11 Ayat (6) sebagai berikut:

Tabel 3.
Tarif Penyusutan Aset Tetap Berwujud berdasarkan
Pengelompokkannya

Kelompok Aset Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Bukan Bangunan			
• Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
• Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
• Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
• Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Bangunan			
• Permanen	20 tahun	5%	
• Tidak Permanen	10 tahun	10%	

(Lubis, 2009, 71)

Keterangan:

1. Yang dimaksud bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan dibuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Misalnya, barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.
2. Dalam rangka memberikan keseragaman kepada Wajib Pajak untuk melakukan penyusutan, maka berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009 ditetapkan jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan yang masa manfaatnya harus diikuti oleh Wajib Pajak.
3. Ayat (1) berarti metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dan ayat (2) adalah metode saldo menurun.

2.3. Pajak Penghasilan**2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif

berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak.

Adapun pengertian Pajak Penghasilan menurut Hery Purwono (2010, 86) adalah:

Salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat yang merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional.

2.3.2. Subjek Pajak Penghasilan Badan

Salah satu subjek pajak menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 adalah Subjek Pajak Badan yaitu:

1. Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. Orang pribadi.
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
 - c. Badan.
 - d. Bentuk usaha tetap.
2. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
3. Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah.
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
4. Subjek pajak luar negeri adalah:
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

- Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
5. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang berupa:
 - a. Tempat kedudukan manajemen.
 - b. Cabang perusahaan.
 - c. Kantor perwakilan.
 - d. Gedung kantor.
 - e. Pabrik.
 - f. Bengkel.
 - g. Gudang.
 - h. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan.
 6. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

2.3.3. Objek Pajak Penghasilan Badan

Pada Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu:

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Objek Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 yaitu:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, ratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha berbasis syariah.

Objek Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan berdasarkan

sumbernya dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. **Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri**
Objek Pajak Badan dalam negeri adalah semua penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan dengan prinsip WWI (*World Wide Income*), yang diterimanya baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
2. **Penghasilan Wajib Pajak Badan Luar Negeri (BUT maupun WP LN bukan BUT).**
 - a. **Penghasilan WP Badan Luar Negeri ada 2 macam yaitu:**

- 1) Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai.
 - 2) Penghasilan kantor pusat dari kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dilakukan oleh BUT di Indonesia.
 - 3) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU PPh, yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut.
- b. Penghasilan WP Badan Luar Negeri Bukan BUT adalah penghasilan-penghasilan yang diterima atau diperoleh Badan Luar Negeri yang bukan berasal dari usaha atau kegiatan di Indonesia tetapi berupa penghasilan modal.
(Mulyo Agung, 2011, 14).

Objek Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan berdasarkan mengalirnya penghasilan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan pokok atau penghasilan teratur Wajib Pajak Badan yaitu berupa:
 - a. Laba usaha.
 - b. Premi asuransi (yang diterima perusahaan asuransi).
 - c. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan.
 - d. Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
2. Penghasilan dari Luar usaha atau luar kegiatan pokok atau penghasilan tidak teratur.
Jenis-jenis Penghasilan Luar Usaha bagi Wajib Pajak Badan.
 - a. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
 - b. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 - c. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - d. Royalti.
 - e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - f. Keuntungan karena selisih kurs mata uang.

- g. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
(Mulyo Agung, 2011, 15).

2.3.4. Penghasilan Bruto

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Menurut Lubis (2009, 106) menyatakan bahwa, "Laba bruto adalah selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan".

Laba bruto masih harus dikurangi dengan biaya-biaya usaha. Atas dasar pertimbangan penerimaan dan pengaruh sosial ekonomi, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan sehingga apabila dibandingkan, komponen biaya menurut akuntansi komersial dapat dikoreksi yang mempengaruhi penghasilan.

Beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dibagi dalam 2 golongan, yaitu:

1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi, bunga, biaya rutin pengolahan limbah, dan sebagainya.
2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.
(Waluyo, 2009, 237).

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

1. Biaya untuk pembelian bahan.
2. Biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
3. Biaya bunga, sewa, royalti.
4. Piutang perjalanan, yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah biaya perjalanan untuk keperluan usaha, dilakukan oleh pegawai wajib pajak, dan didukung bukti-bukti yang sah.
5. Biaya pengolahan limbah.
6. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil.
 - b. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
 - c. Wajib Pajak menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dirjen Pajak.
7. Pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya.
8. Pajak-pajak, yang dapat dibebankan untuk usaha selain PPh adalah seperti PBB, Bea Materai, Pajak Pembangunan I, Pajak Hotel dan Restoran.
9. Biaya promosi yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah yang benar-benar untuk promosi dan bukan sumbangan.
10. Semua pengeluaran di atas harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik.
11. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tidak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.
12. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
13. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
14. Biaya beasiswa, magang, dan penelitian.
(Waluyo, 2010, 103).

Sedangkan pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Undang-undang No 36 Tahun 2008 adalah:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham dan keluarganya.
3. Pembentukan dan pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.
6. Harta, bantuan, sumbangan, warisan yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus sederajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan.
7. Pajak Penghasilan.
8. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
9. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya terbagi atas saham.
10. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.3.5. Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang ditetapkan atas

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yaitu:
 - a. Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dikenakan tarif 5% (lima persen).
 - b. Penghasilan Kena Pajak diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikenakan tarif 15% (lima belas persen).
 - c. Penghasilan Kena Pajak diatas Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dikenakan tarif 25% (dua puluh lima persen).
 - d. Penghasilan Kena Pajak diatas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dikenakan tarif 30% (tiga puluh persen).
2. Tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen) pada tahun 2009. Tarif pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, mulai berlaku sejak tahun pajak 2010, diturunkan menjadi 25% (dua puluh lima persen). (Mardiasmo, 2009, 144).

Untuk dapat menghitung PPh terutang, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang berlandaskan atau bersumber dari laporan keuangan perusahaan (daftar perhitungan laba rugi atau *profit and loss statement*). Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan sama dengan penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan oleh

undang-undang PPh atau setelah dilakukan koreksi fiskal positif dan negatif dapat diperoleh penghasilan neto setelah koreksi.

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Tarif yang digunakan dapat mengikuti antara lain sebagai berikut:

1. Tarif Umum
Tarif pajak ini mengikuti tarif pajak yang ditunjukkan dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Tarif khusus
Tarif ini mengikuti tarif pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah biasanya ditujukan pada penghasilan tertentu sebagai contoh bunga deposito yang diikuti pula dengan pengenaan yang bersifat final.
3. Tarif sesuai Undang-undang
Selain tarif Pasal 17 Undang-undang PPh terdapat pula yang disebutkan dalam pasal 23 Undang-undang PPh ditetapkan dengan tarif 15% (lima belas persen) demikian halnya juga tarif Pasal 26 Undang-undang PPh ditetapkan dengan tarif 20% (dua puluh persen).
(Waluyo, 2010, 112)

2.3.6. Strategi Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan

Strategi mengefisiensikan beban pajak haruslah bersifat legal. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan pengenaan sanksi-sanksi perpajakan yang memberatkan di kemudian hari. Secara umum strategi penghematan pajak menganut prinsip *the least and the latest*, yaitu membayar pajak dengan jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh peraturan perpajakan.

Adapun strategi yang dapat digunakan untuk mengefisiensikan beban PPh Badan yaitu:

1. Pemilihan alternatif dasar pembukuan, basis kas atau basis akrual.
 2. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan.
 3. Pemilihan metode penilaian persediaan.
 4. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap.
 5. Pemilihan sumber penyusutan aset tetap yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku.
 6. Transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak.
 7. Optimasi pengkreditan pajak yang telah dibayar.
 8. permohonan penurunan pembayaran angsuran masa (PPh Pasal 25 bulanan).
- (Erly Suandy, 2008, 121)

Dalam melakukan beberapa efisiensi pembayaran pajak dengan

cara upaya pengurangan pajak adalah sebagai berikut:

1. *Tax avoidance* (penghindaran pajak)
Penghindaran pajak adalah menghindari dari pembayaran pajak secara legal untuk menekan atau meminimalisasi pengeluaran pajak yang dikelola perusahaan, dengan menerobos kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan seperti Undang-undang.
2. *Tax evasion*
Penghematan pajak melalui *tax evasion* dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk usaha yang tepat.
 - b. Mendirikan perusahaan dalam jalur usaha sehingga dapat diatur secara keseluruhan beban dan potensi pajak.
 - c. Menyebarkan penghasilan ke beberapa periode tahun untuk menghindari pengenaan lapisan tarif pajak yang tertinggi.
 - d. Pemanfaatan insentif pajak yang efektif yang terdiri dari:
 - 1) *Tax exemption* (Pengecualian dari pengenaan pajak).
 - 2) *Deduction from the taxable base* (pengurangan dasar pengenaan pajak).
 - 3) *Reduction in the rate of taxes* (pengurangan tarif pajak).
 - 4) *Tax defer* (penangguhan pajak).
3. *Tax Planning*
Perencanaan pajak bertujuan untuk mengefisiensikan beban pajak, sehingga dapat diketahui berapa jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan

sehingga tidak terjadi pembayaran pajak yang berlebihan atau kekurangan yang jumlahnya tidak menimbulkan masalah perpajakan di masa datang.

4. *Tax audit*

Strategi dalam menangani seluk-beluk pemeriksaan pajak, persiapan menghadapi pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan keberatan atau peninjauan kembali dan gugatan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

(Lubis, 2009, 37).

2.4. Pengaruh Kebijakan Penyusutan Aset Tetap terhadap Efisiensi Pajak Penghasilan Badan

Pemilihan metode penyusutan haruslah dilakukan dengan benar dan tepat dan mempertimbangkan untung ruginya untuk masa mendatang. Karena itu beban penyusutan harus dialokasikan secara rasional dan sistematis agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang telah berlaku umum. Beban penyusutan aktiva tetap harus dialokasikan sepanjang umur ekonomis aktiva tersebut dalam menghasilkan pendapatan.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan penyusutan dapat meliputi beberapa hal seperti metode penyusutan, kebijakan penentuan umur ekonomis aktiva tetap. Dalam pemilihan metode penyusutan ini bisa dipengaruhi oleh jumlah dan jenis aktiva tetap serta jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pengaruh kebijakan penyusutan aset tetap terhadap Penghasilan Kena Pajak Badan bagi perusahaan yang utamanya bergerak di bidang barang dan jasa yang menggunakan kendaraan, peralatan dan gedung. Akibat penggunaan aset tetap secara terus menerus, maka semua jenis aset tetap (kecuali tanah) akan semakin berkurang kemampuannya dalam memberikan

kontribusi bersamaan dengan berlalunya waktu hingga terjadinya penyusutan akan aset tersebut.

Akibat perhitungan besarnya penyusutan menurut akuntansi dan fiskal mengalami perbedaan karena adanya perbedaan penentuan masa manfaat, tarif penyusutan, dan saat dimulainya penyusutan. Maka dari itu diperlukan penyusutan aset tetap. Perbedaan tetap disebabkan adanya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dengan fiskal selain itu adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dan ketentuan perpajakan sehingga perusahaan harus melakukan koreksi fiskal, akibat adanya beban pajak sebagai pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak satu periode dan pajak tangguhan yang merupakan jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini yang akan dijadikan objek penelitian adalah pengaruh kebijakan penyusutan aset tetap berwujud terhadap efisiensi Pajak Penghasilan Badan. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk yang berlokasi di Kawasan Industri Jababeka, Jl. Jababeka XII A Blok W 40-41, Cikarang, Bekasi. PT Nippo Indosari Corpindo Tbk merupakan sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1995 dan memulai kegiatan pemasarannya pada tahun 1996.

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pangan sebagai perusahaan roti dengan merk Sari Roti. Pesatnya peningkatan jumlah produksi di pabrik Kawasan Jababeka membuat PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk kembali membangun pabrik Sari Roti pada tahun 2008 yang juga berlokasi di Kawasan Industri Jababeka Cikarang.

Produk yang dihasilkan adalah beragam varian roti Sari Roti dengan berbagai macam rasa seperti roti tawar, roti manis isi, roti krim, dan sebagainya diproduksi di pabrik Sari Roti dengan menggunakan teknologi terbaik dan modern.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan suatu penelitian mengenai pengumpulan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan jenis atau tujuan penelitian. Adapun elemen desain penelitian mencakup:

1. Jenis, Metode, dan Teknik Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis atau bentuk yang digunakan adalah Deskriptif Eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari hubungan-hubungan baru dalam menjelaskan pengaruh kebijakan penyusutan aset tetap berwujud terhadap efisiensi Pajak Penghasilan Badan.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kasus, yaitu penelitian yang bersandar pada prinsip logika kausalitas (sebab akibat) yang berawal dari suatu kejadian pada tataran kausalitas kejadian diposisikan sebagai akibat dari kejadian lain sebelumnya menjadi bersifat umum mengenai pengaruh kebijakan penyusutan aset tetap berwujud terhadap efisiensi Pajak Penghasilan Badan.

c. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah Analisis Kuantitatif, yaitu melalui data yang diperoleh kemudian disusun, dipelajari, dan dianalisis, dan dianalisis lebih lanjut untuk menjelaskan pengaruh kebijakan penyusutan aset tetap berwujud terhadap efisiensi Pajak Penghasilan Badan.

2. Unit Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan unit analisis *organization*, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari divisi organisasi atau perusahaan yaitu di Bagian Akuntansi dan Keuangan pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.

3.2.2. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis mengklasifikasi variabel penelitian menjadi dua kelompok:

1. Variabel Independen (variabel tidak terikat/bebas), yaitu variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Pada skripsi ini yang menjadi variabel independen adalah pengaruh kebijakan penyusutan aset tetap berwujud.
2. Variabel Dependen (variabel terkait/tidak bebas), yaitu variabel yang dipengaruhi variabel independen. Pada skripsi ini yang menjadi variabel dependen adalah efisiensi Pajak Penghasilan Badan.

Adapun pengukuran dan operasionalisasi variabel yang dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.
Operasionalisasi Variabel
Pengaruh Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Berwujud
terhadap Efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.

Variabel/Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pengaruh Kebijakan Aset Tetap Berwujud Sub Variabel: Menurut Ketentuan Perpajakan	a. Harga Perolehan	a) Jumlah harga perolehan sesuai dengan UU PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 10	Rasio
	b. Masa Manfaat	b) Jumlah waktu penyusutan sesuai dengan UU PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6)	Rasio
	c. Tarif Penyusutan	c) Besarnya tarif penyusutan berdasarkan UU PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6)	Rasio
	d. Metode Penyusutan: 1) Garis Lurus 2) Saldo Menurun	d) Metode penyusutan berdasarkan UU PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (1) dan (2)	Rasio

Efisiensi Pajak Penghasilan Badan			
Sub Variabel: Penghasilan Bruto	a. Penghasilan bruto menurut Peraturan Perpajakan	a) Jumlah penghasilan bruto sesuai UU PPh No 36 Tahun 2008 pasal 4	Rasio
Pengurang Penghasilan Bruto	b. Biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan	b) Jumlah biaya pengurang penghasilan bruto sesuai dengan UU PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1)	Rasio
Tarif Pajak	c. Besarnya tarif pajak penghasilan yang digunakan	c) Tarif pajak sesuai dengan UU PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1)	Rasio

3.2.3. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan melalui prosedur pengumpulan data dibawah ini:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dengan cara membaca, mempelajari, meneliti, dan menelaah literatur yang terdiri dari buku-buku teks, diktat serta data kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dengan mengadakan survai terhadap data yang telah ada, peneliti mempelajari dan memahami teori-teori yang ada kaitannya dengan bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-

metode, menganalisa data guna memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder informasi umumnya bukti yang berada satu langkah atau lebih dari peristiwa yang sesungguhnya. Sumber sekunder mencakup dokumen atau rekaman lain yang memberikan bukti mengenai atau tentang sesuatu yang telah terjadi. Data yang didapatkan dalam penelitian ini berupa data sekunder diperoleh dari pihak kedua yaitu data yang dikumpulkan melalui website PT Nippon Indosari Tbk, data yang didapatkan berupa laporan keuangan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk dari kurun waktu empat tahun, mulai tahun 2008 sampai tahun 2011.

3.2.4. Metode Analisis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis menggunakan metode analisis Deskriptif Kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana adanya atau mengungkap fakta secara lebih mendalam mengenai pengaruh kebijakan penyusutan aset tetap berwujud terhadap efisiensi Pajak Penghasilan Badan.

Untuk menghitung penyusutan aset tetap dapat dilakukan dengan metode penyusutan aset yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Metode garis lurus menurut Rudianto (2008, 277) adalah metode perhitungan depresiasi aktiva tetap dimana setiap periode akuntansi diberikan beban yang sama secara merata. Cara perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Depresiasi} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Taksiran Umur Ekonomis Aktiva}}$$

2. Metode saldo menurun menurut Waluyo (2009, 102) adalah menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Dalam metode ini, besarnya biaya penyusutan semakin lama menjadi lebih kecil dari tahun ke tahun. perhitungan biaya penyusutan dapat dirumuskan:

$$\text{Biaya Penyusutan} = \text{Tarif Penyusutan} \times \text{Dasar Penyusutan.}$$

$$\text{Dasar Penyusutan} = \text{Harga Sisa Buku Awal Tahun.}$$

Dalam perhitungan penyusutan dengan garis lurus nilai penyusutan tiap tahunnya akan sama, sedangkan perhitungan penyusutan dengan saldo menurun, nilai penyusutan tiap tahunnya akan berbeda dan pada akhir masa manfaat nilai buku disusutkan sekaligus. Pada dasarnya, kedua metode penyusutan aset tetap ini pada akhir masa manfaat akan menghasilkan akumulasi penyusutan yang sama. Yang membedakannya hanya pengakuan besarnya beban penyusutan aset tetap disetiap tahunnya.

Demikian pula dari sudut pandang *time value of money*, jika kita hitung dalam nilai sekarang (*present value*) dengan *discount factor* maka nilai akumulasi kedua metode tersebut tidak akan sama, sehingga dapat terlihat didalam menghitung dan membukukan biaya penyusutan akan menguntungkan atau tidaknya dari segi penghematan

beban pajak. Menurut Dermawan Sjahrial (2008,1) rumus yang digunakan untuk mencari nilai sekarang adalah:

$$PV = \frac{FV}{(1 + i)^n}$$

Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang, dapat ditentukan berdasarkan besarnya tarif Pajak Penghasilan Badan yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan BUT untuk tahun pajak 2008 dan sebelumnya masih menggunakan tarif progresif yaitu:
 - a. Sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tarif pajak 10% (sepuluh persen).
 - b. Penghasilan Kena Pajak diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tarif pajak 15% (lima belas persen).
 - c. Penghasilan Kena Pajak diatas Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tarif pajak 30% (tiga puluh persen).
(Tulis dan Fransisca, 2008, 111).
2. Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan BUT untuk tahun pajak 2009 yaitu:
 - a. Peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) perhitungannya adalah $50\% \times 28\% \times \text{PKP}$.
 - b. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:
 $(\text{Rp } 4.800.000.000 : \text{Peredaran Bruto}) \times \text{Rp PKP}$.
 - c. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:
 $(\text{PKP} - \text{jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas})$.

Pajak Penghasilan yang terutang:

$50\% \times 28\% \times \text{jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas}$.

- 28% x jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas.
3. **Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan BUT untuk tahun pajak 2010 yaitu:**
- a. **Peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) perhitungannya adalah $50\% \times 25\% \times \text{PKP}$.**
 - b. **Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:
(Rp 4.800.000.000 : Peredaran Bruto) x Rp PKP.**
 - c. **Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:
(PKP – jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas).**

Pajak Penghasilan yang terutang:

$50\% \times 25\% \times$ jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.

$25\% \times$ jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas.

(Thomas Sumarsan, 2012, 195).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum PT Nippon Indosari Corpindo Tbk

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi produk makanan berupa roti. Perseroan berdiri dengan nama PT Nippon Indosari Corporation, anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, Perseroan mengubah anggaran dasarnya untuk di sesuaikan dengan anggaran dasar perseroan terbuka sekaligus mengubah nama Perseroan menjadi PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.

Perusahaan beroperasi secara komersial dengan 2 (dua) lini produksi di sebuah pabrik di Blok W, Jababeka Industrial Estate, Cikarang Jawa Barat dan roti diproduksi dengan merek Sari Roti. Pada awal berdirinya, Perseroan mempunyai 2 (dua) lini mesin dimana 1 (satu) mesin digunakan untuk pembuatan jenis roti tawar dan 1 (satu) lini mesin digunakan untuk pembuatan jenis roti manis.

Merek utama Perseroan adalah Sari Roti yang diluncurkan sejak awal Perseroan beroperasi secara komersial. Sementara merek penunjang untuk segmen menengah bawah diwakili oleh 'Boti' yang

di luncurkan sejak awal tahun 2001. Saat ini Perseroan juga merambah ke jenis *cake* dengan mengeluarkan merek Sari Cake.

4.1.2. Struktur Organisasi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Struktur organisasi menunjukkan susunan dari tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian atau fungsi yang ada dalam perusahaan. Bentuk dan struktur organisasi perusahaan disesuaikan dengan kegiatan perusahaan sehingga perkembangan perusahaan diikuti pula dengan penyempurnaan struktur organisasinya sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri.

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk menggunakan struktur organisasi garis dan staff yang terdiri dari: Dewan Komisaris, Direktur, *Internal Auditor*, Manajer Keuangan, Manajer Pemasaran, Manajer Produksi, Manajer Pembelian, Manajer Personalia.

Jenjang manajemen serta tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian yang terdapat di dalam struktur organisasi PT Nippon Indosari Corpindo Tbk adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

Tugas utama dari Dewan Komosaris adalah:

- a. Mengawasi setiap tindakan atas keputusan dan kebijakan yang diambil oleh direktur.
- b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan perusahaan dan mengawasi aktivitas perusahaan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan perusahaan dapat tercapai.

- c. Mengawasi jalannya perusahaan apakah telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- d. Membuat kebijakan-kebijakan, baik untuk kalangan intern maupun kalangan ekstern perusahaan.

2. Direktur

Didalam mengawasi seluruh aktivitas perusahaan, seorang Direktur pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk dibantu oleh seorang Manajer pada setiap departemen yang dimiliki perusahaan dan Direktur memiliki tanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Adapun tugas utama dari Direktur adalah:

- a. Membuat dan mengambil keputusan atau rencana kerja perusahaan secara menyeluruh.
- b. Menentukan kebijaksanaan keuangan perusahaan.
- c. Mewakili perusahaan dalam rangka menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi dan keuangan dengan perusahaan lain.
- d. Menetapkan pembagian kerja kepada seluruh manajer sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
- e. Mengawasi tindakan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh setiap manajer terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan departemennya masing-masing.

3. *Internal Auditor*

Tugas dan wewenang *Internal Auditor* adalah:

- a. Meneliti dan menilai efektivitas dalam penerapan struktur pengendalian intern dibidang akuntansi, keuangan, operasional, dan kegiatan perusahaan lainnya.
- b. Membuat laporan mengenai hasil kegiatan audit dan perbaikan kepada direktur.
- c. Membuat rencana serta mengusulkan kepada direktur mengenai kebijakan prosedur dan program dibidang audit.
- d. Membuat program kerja dan jadwal audit atas unit-unit yang ada dalam perusahaan.

4. Manajer Keuangan

Tugas utama manajer Keuangan adalah:

- a. Mengawasi dan mengendalikan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan arus kas, penjualan, pembelian, dan persediaan di dalam perusahaan.
- b. Membuat dan menyajikan laporan keuangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dan membutuhkan.
- c. Membuat dan melakukan analisis keuangan, yang berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan keuangan bagi direktur perusahaan dan dewan direksi.
- d. Berhubungan dengan pihak ketiga, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan dan perbankan.
- e. Menangani dan mengatur pembayaran atas upah dan gaji karyawan produksi.

Keputusan yang dibuat oleh Manajer Keuangan dan berkaitan dengan tugasnya harus mendapatkan persetujuan dari Direktur dan dipertanggung jawabkan kepada Dewan Komisaris.

5. Manajer Pemasaran

Tugas utama manajer pemasaran adalah:

- a. Berusaha memasarkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan mencari pangsa pasar yang baru, sehingga dapat mencapai target penjualan yang diinginkan perusahaan.
- b. Mengendalikan dan mengkoordinir para distributor yang dimiliki perusahaan.
- c. Melakukan promosi atas produk-produk yang dihasilkan perusahaan.

Dalam menjalankan tugasnya, Manajer Pemasaran bertanggung jawab kepada Direktur.

6. Manajer Produksi

Manajer produksi bertanggung jawab atas kelancaran produksi serta mengoptimalkan bagian produksi agar dapat bekerja seoptimal mungkin, tugas Manajer Produksi antara lain:

- a. Mengatur, mengarahkan, dan mengawasi karyawan agar menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sehingga dapat mencapai produk yang berkualitas.

- b. Mengatur jadwal produksi berdasarkan jumlah pesanan yang diterima dari distributor yang dikoordinir oleh Departemen Pemasaran.
- c. Merencanakan dan mengendalikan seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku menjadi barang jadi.
- d. Membuat laporan produksi untuk dipertanggung jawabkan kepada Direktur.

7. Manajer Pembelian

Tugas utama Manajer Pembelian adalah:

- a. Mencari supplier yang berkualitas.
- b. Berusaha mencari harga bahan baku yang rendah dengan kualitas yang sesuai dengan standar produksi.
- c. Berusaha memenuhi kebutuhan bahan baku yang diperlukan oleh bagian produksi dengan tepat waktu.
- d. Membuat laporan pembelian untuk dipertanggung jawabkan kepada Direktur.

8. Manajer Personalia

Tugas utama Manajer personalia adalah:

- a. Mengkoordinir permintaan tenaga kerja dari seluruh departemen yang ada di dalam perusahaan.
- b. Mencari dan menyeleksi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga didapatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

- c. Mengawasi dan menyelesaikan semua masalah yang berhubungan dengan perburuhan.

Dalam menjalankan tugasnya, Manajer Personalia bertanggung jawab kepada Direktur.

4.1.3. Bidang dan Kegiatan Usaha PT Nippon Indosari Corpindo Tbk

Kegiatan dari PT Nippon Indosari Corpindo Tbk adalah menjalankan usaha di bidang produksi makanan. Adapun produk yang dihasilkan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Merek Sari Roti
 - a. Roti Tawar yang terdiri dari: Roti Tawar Spesial, Roti Kismis, Roti Gandum, Roti Coklat Chip, dan Roti Tawar Pandan.
 - b. Roti Manis yang terdiri dari: Roti Isi Sarikaya, Roti Isi Keju, Roti Isi Coklat, Roti Isi Strawberry, dan Roti Isi Kelapa.
 - c. Roti Sandroll yang terdiri dari: Roti Isi Krim Mocca, Roti Isi Krim Coklat, Roti Isi Krim Keju, dan Roti Isi Sosis.
2. Merek Boti yang terdiri dari:
 - a. Roti Tawar yang terdiri dari: Roti Tawar, dan Roti Tawar Pandan.
 - b. Roti Manis yang terdiri dari: Roti Isi Kelapa, Roti Isi Sarikaya, Roti Isi Keju, Roti Isi Coklat, Roti Isi Strawberry, dan Roti Isi Kacang Hijau.

- c. Roti Sobek yang terdiri dari: Roti Sobek Isi Coklat dan Keju, Roti Sobek Isi Coklat dan Sarikaya, dan Roti Sobek Isi Coklat.
3. Merek Sari Cake terdiri dari: Bolu Chiffon Rasa Pandan, Bolu Chiffon Rasa Coklat, dan Bolu Chiffon Rasa Keju.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Kebijakan Penyusutan Aset tetap Berdasarkan Ketentuan Perpajakan pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk menggunakan aset tetap untuk mendukung kegiatan operasional. Dapat diketahui kebijakan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk adalah sebagai berikut:

1. Aset tetap berwujud yang digunakan berupa Bangunan dan Pengembangan, Mesin dan peralatan, Alat Pengangkutan serta Perabotan dan Peralatan Kantor. Aset tersebut digunakan dalam kegiatan produksi atas barang dan jasa dan dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Tanah tidak dapat disusutkan dan berdasarkan biaya perolehan, penyusutan lainnya seperti Bangunan dan Pengembangan, Mesin dan peralatan, Alat Pengangkutan serta Perabotan dan Peralatan kantor dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis.
3. Perolehan aset tetap dilakukan dengan cara pembelian untuk semua jenis aset tetapnya, apabila terjadi pembelian aset baru

pada tahun berjalan kemudian dimasukkan pada kolom penambahan daftar aset, begitu pula dengan pengurangan dan penjualan aset. Pengurangan terjadi jika penilaian nilai pasar harga aset tetap, dan harga penyusutan menurut harga pasar, sedangkan penjualan terjadi jika biaya pemeliharaan sudah tidak ekonomis untuk dilakukan perbaikan.

Berikut harga perolehan, penambahan, pengurangan, reklasifikasi dan saldo akhir yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2008-2011 adalah:

Tabel 5.
Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, Reklasifikasi dan Saldo Akhir Aset Tetap
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk per 31 Desember 2008
(Dalam Rp)

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Tanah	14.262.560.216	-	-	-	14.262.560.216
Bangunan	46.292.894.131	245.539.030	-	30.643.831.902	77.182.265.063
Mesin dan Peralatan	85.810.522.074	3.051.467.477	111.375.500	51.187.647.254	139.938.261.305
Alat Pengangkut	8.091.184.550	1.754.340.000	30.250.000	-	9.815.274.550
Perabot dan Peralatan kantor	8.608.191.967	1.673.603.885	71.265.470	362.068.100	10.572.598.462
Jumlah	163.875.352.938	6.724.950.372	212.890.970	82.193.547.256	251.770.959.596

(Sumber: PT Nippon Indosari Corpindo Tbk Tahun 2008)

Berdasarkan pada tabel 5. Dapat diketahui bahwa saldo awal aset tetap pada tahun 2008 sebesar Rp 163.875.352.938 dan mengalami penambahan aset sebesar Rp 6.724.950.372 serta mengalami pengurangan aset sebesar Rp 212.890.970 yang

disebabkan karena adanya penjualan atau penarikan aset tetap, serta terjadi reklasifikasi sebesar Rp 82.193.547.256 dan saldo akhirnya menjadi Rp 251.770.959.596.

Tabel 6.
Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, Reklasifikasi dan Saldo Akhir Aset Tetap
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk per 31 Desember 2009
(Dalam Rp)

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Tanah	14.262.560.216	-	-	-	14.262.560.216
Bangunan	77.182.265.063	2.381.345.989	-	940.667.560	80.504.278.612
Mesin dan Peralatan	139.938.261.305	9.002.327.710	-	-	148.940.589.015
Alat Pengangkut	9.815.274.550	1.413.760.000	676.722.724	-	10.552.311.826
Perabot dan Peralatan kantor	10.572.598.462	1.728.575.979	48.845.338	-	12.252.329.103
Jumlah	251.770.959.596	14.526.009.678	725.568.062	940.667.560	266.512.068.772

(Sumber: PT Nippon Indosari Corpindo Tbk Tahun 2009)

Berdasarkan pada tabel 6. Dapat diketahui bahwa saldo awal aset tetap pada tahun 2009 sebesar Rp 251.770.959.596 dan mengalami penambahan aset sebesar Rp 14.526.009.678 serta mengalami pengurangan aset sebesar Rp 725.568.062 yang disebabkan karena adanya penjualan atau penarikan aset tetap, serta terjadi reklasifikasi sebesar Rp 940.667.560 dan saldo akhirnya menjadi Rp 266.512.068.772.

Tabel 7.
Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, Reklasifikasi dan Saldo Akhir Aset Tetap
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk per 31 Desember 2010
(Dalam Rp)

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Tanah	14.262.560.216	15.658.380.000	1.080.976.000	1.170.452.000	30.010.416.216
Bangunan	80.504.278.612	14.914.175.438	-	3.230.916.313	98.649.370.363
Mesin dan Peralatan	148.940.589.015	54.584.216.384	76.500.000	1.300.086.069	204.748.391.468
Alat Pengangkut	10.552.311.826	1.605.915.909	778.806.364	11.700.000	11.391.121.371
Perabot dan Peralatan kantor	12.252.329.103	3.239.824.077	165.839.875	591.305.800	15.917.619.105
Jumlah	266.512.068.772	90.002.511.808	2.102.122.239	6.304.460.182	360.716.918.523

(Sumber: PT Nippon Indosari Corpindo Tbk Tahun 2010)

Berdasarkan pada tabel 7. Dapat diketahui bahwa saldo awal aset tetap pada tahun 2010 sebesar Rp 266.512.068.772 dan mengalami penambahan aset sebesar Rp 90.002.511.808 serta mengalami pengurangan aset sebesar Rp 2.102.122.239 yang disebabkan karena adanya penjualan atau penarikan aset tetap, serta terjadi reklasifikasi sebesar Rp 6.304.460.182 dan saldo akhirnya menjadi Rp 360.716.918.523.

Tabel 8.
Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, Reklasifikasi dan Saldo Akhir Aset Tetap
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk per 31 Desember 2011
(Dalam Rp)

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Tanah	30.010.416.216	206.136.792	-	3.955.600.000	34.172.153.008
Bangunan	98.649.370.363	41.298.017.643	-	25.201.800.501	165.149.188.507
Mesin dan Peralatan	204.748.391.468	88.688.741.198	-	18.409.719.457	311.846.852.123
Alat Pengangkut	11.391.121.371	3.117.018.000	401.250.000	-	14.166.889.371
Perabot dan Peralatan kantor	15.917.619.105	14.940.303.093	865.341.598	2.200.000	29.994.780.600
Jumlah	360.716.918.523	148.309.493.171	1.266.591.598	47.569.319.958	555.329.863.609

(Sumber: PT Nippon Indosari Corpindo Tbk Tahun 2011)

Berdasarkan pada tabel 8. Dapat diketahui bahwa saldo awal aset tetap pada tahun 2011 sebesar Rp 360.716.918.523 dan mengalami penambahan aset sebesar Rp 148.309.493.171 serta mengalami pengurangan aset sebesar Rp 1.266.591.598 yang disebabkan karena adanya penjualan atau penarikan aset tetap, serta terjadi reklasifikasi sebesar Rp 47.569.319.958 dan saldo akhirnya menjadi Rp 555.329.863.609.

4.2.2. Pengelompokan Harta Berwujud Bukan Bangunan

Jenis-jenis harta yang termasuk dalam masing-masing kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.03/2009 Tanggal 15 Mei 2009. Harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan

masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang dikelompokkan menjadi Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3, dan Kelompok 4.

Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan pada Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3, dan Kelompok 4 yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.

Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV, untuk kepentingan penyusutan digunakan masa manfaat dalam kelompok 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib Pajak dapat memperoleh penetapan masa manfaat atas jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya.

4.2.2.1. Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Ketentuan Perpajakan dengan menggunakan Metode Garis Lurus

Wajib Pajak dapat memilih dan melakukan penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta bukan bangunan yang masih

dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun.

Dalam menghitung besarnya penyusutan atas harta berwujud bukan bangunan, Wajib Pajak hanya diperbolehkan menggunakan salah satu dari kedua metode penyusutan tersebut untuk seluruh jenis harta berwujud dan penggunaan metode penyusutan tersebut harus dilakukan secara taat azas.

Penyusutan merupakan suatu metode pembebanan biaya terhadap aset tetap maka diperlukannya pengenaan tarif penyusutan. Berdasarkan ketentuan perpajakan penggolongan aset tetap yang tidak dapat disusutkan terdiri dari tanah, dan aset tetap yang dapat disusutkan terdiri dari mesin, peralatan, bangunan.

Perhitungan dalam metode penyusutan dengan menggunakan garis lurus, nilai penyusutan tiap tahunnya akan sama, sedangkan perhitungan penyusutan dengan metode saldo menurun, nilai penyusutan akan berbeda tiap tahunnya dan pada akhir masa manfaat nilai buku akan disusutkan sekaligus. Perhitungan kedua metode penyusutan tersebut akan menghasilkan akumulasi penyusutan sama pada akhir masa manfaat, sedangkan pengakuan beban penyusutan aset tetap akan berbeda setiap tahunnya.

Berikut adalah perhitungan beban penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus menurut ketentuan perpajakan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 9.
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan
Metode Garis Lurus Tahun 2008
(Dalam Rp)

No.	Keterangan	Kelompok Harta Berwujud	Nilai Perolehan	Beban Penyusutan Tahun 2008
1.	Bangunan	Permanen	46.292.894.131	2.314.644.707
2.	Mesin dan Peralatan	Kelompok II	85.810.522.074	10.726.315.259
3.	Alat Pengangkut	Kelompok II	8.091.184.550	1.011.398.069
4.	Perabot dan Peralatan Kantor	Kelompok I	8.608.191.967	2.152.047.992
Jumlah			148.802.792.722	16.204.406.026

(Sumber: PT Nippon Indosari Corpindo Tbk data diolah penulis)

Dari tabel 9. Dapat diketahui bahwa beban penyusutan tahun 2008 pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk berdasarkan metode garis lurus sebesar Rp 16.204.406.026.

Tabel 10.
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan
Metode Garis Lurus Tahun 2009
(Dalam Rp)

No.	Keterangan	Kelompok Harta Berwujud	Nilai Perolehan	Akumulasi Nilai Perolehan	Beban Penyusutan Tahun 2008	Beban Penyusutan Tahun 2009
1.	Bangunan	Permanen	77.182.265.063	123.475.159.194	2.314.644.707	6.173.757.960
2.	Mesin dan Peralatan	Kelompok II	139.938.261.305	225.748.783.379	10.726.315.259	28.218.597.922
3.	Alat Pengangkut	Kelompok II	9.815.274.550	17.906.459.100	1.011.398.069	2.238.307.388
4.	Perabot dan Peralatan Kantor	Kelompok I	10.572.598.462	19.180.790.429	2.152.047.992	4.795.197.607
Jumlah			237.508.399.380	386.311.192.102	16.204.406.026	41.425.860.877

(Sumber: PT Nippon Indosari Corpindo Tbk data diolah penulis)

Dari tabel 10. Dapat diketahui bahwa beban penyusutan tahun 2008 pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk berdasarkan metode garis lurus sebesar Rp 16.204.406.026, dan tahun 2009 sebesar Rp 41.425.860.877 Serta akumulasi nilai perolehan sebesar Rp 386.311.192.102.

Tabel 11.
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan
Metode Garis Lurus Tahun 2010
(Dalam Rp)

No.	Keterangan	Kelompok Harta Berwujud	Nilai Perolehan	Akumulasi Nilai Perolehan	Beban Penyusutan Tahun 2008	Beban Penyusutan Tahun 2009	Beban Penyusutan Tahun 2010
1.	Bangunan	Permanen	80.504.27.612	203.979.437.806	2.314.644.707	6.173.757.960	10.198.971.890
2.	Mesin dan Peralatan	Kelompok II	148.940.589.015	374.689.372.394	10.726.315.259	28.218.597.922	46.836.171.549
3.	Alat Pengangkut	Kelompok II	10.552.311.826	28.458.770.926	1.011.398.069	2.238.307.388	3.557.346.366
4.	Perabot dan Peralatan Kantor	Kelompok I	12.252.329.103	31.433.119.532	2.152.047.992	4.795.197.607	7.858.279.883
Jumlah			252.2.9.508.556	638.560.700.658	16.204.406.026	41.425.860.877	68.450.769.688

Sumber: PT Nippon Indosari Corpindo Tbk data diolah penulis)

Dari tabel 11. Dapat diketahui bahwa beban penyusutan tahun 2008 pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk berdasarkan metode garis lurus sebesar Rp 16.204.406.026, tahun 2009 sebesar Rp 41.425.860.877, dan tahun 2010 Rp 68.450.769.688 Serta akumulasi nilai perolehan sebesar Rp 638.560.700.658.

Tabel 12.
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan
Metode Garis Lurus Tahun 2011
(Dalam Rp)

Keterangan	Kelompok Harta Berwujud	Nilai Perolehan	Akumulasi Nilai Perolehan	Beban Penyusutan Tahun 2008	Beban Penyusutan Tahun 2009	Beban Penyusutan Tahun 2010	Beban Penyusutan Tahun 2011
Bangunan	Permanen	98.649.307.363	302.628.745.169	2.314.644.707	6.173.757.960	10.198.971.890	15.131.437.258
Mesin dan Peralatan	Kelompok II	204.748.391.468	579.437.763.862	10.726.315.259	28.218.597.922	46.836.171.549	72.429.720.483
Alat Pengangkut	Kelompok II	11.391.121.371	39.849.892.297	1.011.398.069	2.238.307.388	3.557.346.366	4.981.236.537
Perabot dan Peralatan Kantor	Kelompok I	15.917.619.105	47.350.738.637	2.152.047.992	4.795.197.607	7.858.279.883	11.837.684.657
Jumlah		330.706.439.307	969.267.139.965	16.204.406.026	41.425.860.877	68.450.769.688	104.380.078.938

er: PT Nippon Indosari Corpindo Tbk data diolah penulis)

Dari tabel 12. Dapat diketahui bahwa beban penyusutan tahun 2008 pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk berdasarkan metode garis lurus sebesar Rp 16.204.406.026, tahun 2009 sebesar Rp 41.425.860.877, tahun 2010 Rp 68.450.769.688 dan tahun 2011 Rp 104.380.078.938 Serta akumulasi nilai perolehan sebesar Rp 969.267.139.965.

4.2.2.2. Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Ketentuan Perpajakan dengan Metode Saldo Menurun

Apabila pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk menggunakan metode saldo menurun berdasarkan ketentuan perpajakan, maka menghitung aset tetap tahun 2008 sampai dengan 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 13.
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan
Metode Saldo Menurun Tahun 2008
(Dalam Rp)

No.	Keterangan	Kelompok Harta Berwujud	Tarif	Nilai Perolehan	Beban Penyusutan Tahun 2008
1.	Mesin dan Peralatan	Kelompok II	25%	85.810.522.074	21.452.630.519
2.	Alat Pengangkut	Kelompok II	25%	8.091.184.550	2.022.796.138
3.	Perabot dan Peralatan Kantor	Kelompok I	50%	8.608.191.967	4.304.095.984
Jumlah				102.509.898.591	27.779.522.640

(Sumber: PT Nippon Indosari Corpindo Tbk data diolah penulis)

Dari tabel 13. Dapat diketahui bahwa beban penyusutan tahun 2008 pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk berdasarkan metode saldo menurun sebesar Rp 27.779.522.640.

Tabel 14.
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan
Metode Saldo Menurun Tahun 2009
(Dalam Rp)

No.	Keterangan	Kelompok Harta Berwujud	Tarif	Nilai Perolehan	Akumulasi Nilai Perolehan	Beban Penyusutan Tahun 2008	Beban Penyusutan Tahun 2009
1.	Mesin dan Peralatan	Kelompok II	25%	139.938.261.305	225.748.783.379	16.089.472.889	34.984.565.326
2.	Alat Pengangkut	Kelompok II	25%	9.815.274.550	17.906.459.100	1.517.097.103	2.453.818.638
3.	Perabot dan Peralatan Kantor	Kelompok I	50%	10.572.598.462	19.180.790.429	2.152.047.992	5.286.299.231
Jumlah				160.326.134.317	262.836.032.908	19.758.617.984	42.724.683.195

Sumber: PT Nippon Indosari Corpindo Tbk data diolah penulis)

Dari tabel 14. Dapat diketahui bahwa beban penyusutan tahun 2008 pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk berdasarkan metode saldo menurun sebesar Rp 19.758.617.984, dan tahun 2009 sebesar Rp 42.724.683.195. Serta akumulasi nilai perolehan sebesar Rp. 262.836.032.908.

Tabel 15.
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan
Metode Saldo Menurun Tahun 2010
(Dalam Rp)

Keterangan	Kelompok Harta Berwujud	Tarif	Nilai Perolehan	Akumulasi Nilai Perolehan	Beban Penyusutan Tahun 2008	Beban Penyusutan Tahun 2009	Beban Penyusutan Tahun 2010
Mesin dan Peralatan	Kelompok II	25%	148.940.589.015	374.689.372.394	12.067.104.667	26.238.423.995	37.235.147.254
Alat Pengangkut	Kelompok II	25%	10.552.311.826	28.458.770.926	1.137.822.827	1.840.363.978	2.638.077.957
Perabot dan Peralatan Kantor	Kelompok I	50%	12.252.329.103	31.433.119.532	1.076.023.996	2.643.149.616	6.126.164.552
Jumlah			171.745.229.944	434.581.262.852	14.280.951.490	30.721.937.588	45.999.389.762

ber: PT Nippon Indosari Corpindo Tbk data diolah penulis)

Dari tabel 15. Dapat diketahui bahwa beban penyusutan tahun 2008 pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk berdasarkan metode saldo menurun sebesar Rp 14.280.951.490, tahun 2009 sebesar Rp 30.721.937.588, dan tahun 2010 Rp 45.999.389.762. Serta akumulasi nilai perolehan sebesar Rp 434.581.262.852.

Tabel 16.
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan
Metode Saldo Menurun Tahun 2011
(Dalam Rp)

No.	Keterangan	Kelompok Harta Berwujud	Tarif	Nilai Perolehan	Akumulasi Nilai Perolehan	Beban Penyusutan Tahun 2008	Beban Penyusutan Tahun 2009	Beban Penyusutan Tahun 2010	Beban Penyusutan Tahun 2011
1.	Mesin dan Peralatan	Kelompok II	25%	204.748.391.468	579.437.763.862	6.703.947.037	19.678.817.996	27.926.360.440	51.187.097.867
2.	Alat Pengangkut	Kelompok II	25%	11.391.121.371	39.849.892.297	632.123.793	1.380.272.984	1.978.558.467	2.847.780.343
3.	Perabot dan Peralatan Kantor	Kelompok I	50%	15.917.619.105	47.350.738.637	-1.076.023.996	1.321.574.808	3.063.082.276	7.958.809.553
Jumlah				232.057.131.944	666.638.394.796	6.260.046.834	22.380.665.787	32.968.001.183	61.993.687.762

Sumber: PT Nippon Indosari Corpindo Tbk data diolah penulis)

Dari tabel 16. Dapat diketahui bahwa beban penyusutan tahun 2008 pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk berdasarkan metode saldo menurun sebesar Rp 6.260.046.834, tahun 2009 sebesar Rp 22.380.665.787, tahun 2010 Rp 32.968.001.183 dan tahun 2011 Rp 61.993.687.762. Serta akumulasi nilai perolehan sebesar Rp 666.638.394.796.

4.2.3. Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk sebagai Wajib Pajak harus patuh terhadap ketentuan yang mengatur tentang masalah perpajakan, dengan membayar pajak, maka PT Nippon Indosari Corpindo Tbk berperan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam efisiensi beban pajak, sebelum menentukan metode mana yang akan digunakan, sebaiknya dapat melihat kondisi perusahaan yang bersangkutan. Jika kondisi perusahaan adalah laba dan besarnya penghasilan kena pajak sudah mencapai tarif pajak tertinggi, maka metode saldo menurun menguntungkan dan sebaliknya jika kondisi perusahaan diperkirakan belum memberikan keuntungan atau timbul rugi lebih baik memilih metode garis lurus yang memberikan biaya lebih kecil agar biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.

Berikut ini merupakan perbandingan beban penyusutan aset tetap PT Nippon Indosari Corpindo Tbk antara metode garis lurus dan saldo menurun dan *present value* dengan penetapan *discount factor* atas dasar tingkat suku bunga Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 17.
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara
Metode Garis Lurus Dan Saldo Menurun Dengan *Present Value* tahun 2008
(Dalam Rp)

Jenis Aset	Df 9%	Garis Lurus		Saldo Menurun		Beda Temporer
		Nominal	PV	Nominal	PV	
dan Peralatan	0,9174	10.726.315.259	9.840.321.619	21.452.630.519	19.680.643.238	9.840.321.619
angkutan	0,9174	1.011.398.069	927.856.588	2.022.796.138	1.855.713.177	927.856.588
ot dan Peralatan Kantor	0,9174	2.152.047.992	1.974.288.828	4.304.095.984	3.948.577.655	1.974.288.828
Total		13.889.761.320	12.742.467.035	27.779.522.640	25.484.934.069	12.742.467.035
Penghematan Pajak = Rp 12.742.467.035 x 30%						3.822.740.110

er: PT Nippon Indosari Corpindo Tbk data diolah penulis)

Dari tabel 17. Dapat dilihat aset yang saat perolehannya dengan garis lurus sebesar Rp 13.889.761.320 dan saldo menurun sebesar Rp 27.779.522.640 yang di peroleh dari

akumulasi beban penyusutan tahun 2008 dengan *discount factor* 9% jumlah nilai tunai (*present value*), dengan menggunakan metode garis lurus sebesar Rp 12.742.467.035 (Penjumlahan beban penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus tahun 2008 dikali dengan *discount factor* sebesar 9%). Dan untuk metode saldo menurun sebesar Rp 25.484.934.069 yang di peroleh dari (Penjumlahan beban penyusutan aset tetap dengan metode saldo menurun tahun 2008 dikali dengan *discount factor* sebesar 9%). Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 12.742.467.035, maka didapat efisiensi beban pajak sebesar Rp 3.822.740.110.

Tabel 18.
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara
Metode Garis Lurus Dan Saldo Menurun Dengan *Present Value* tahun 2009
(Dalam Rp)

Jenis Aset	Df 7%	Garis Lurus		Saldo Menurun		Beda Temporer
		Nominal	PV	Nominal	PV	
dan Peralatan	0,9346	28.218.597.922	26.373.101.618	51.074.038.215	47.733.796.116	21.360.694.498
angkutan	0,9346	2.238.307.388	2.091.922.084	3.970.915.741	3.711.217.851	1.619.295.767
ot dan Peralatan Kantor	0,9346	4.795.197.607	4.481.591.684	7.438.347.223	6.951.879.314	2.470.287.631
Total		35.252.102.917	32.946.615.386	62.483.301.179	58.396.893.281	25.450.277.895
Penghematan Pajak = Rp 25.450.277.895 x 28%						7.126.077.811

er: PT Nippon Indosari Corpindo Tbk data diolah penulis)

Dari tabel 18. Dapat dilihat aset yang saat perolehannya dengan garis lurus sebesar Rp 35.252.102.917 dan saldo menurun sebesar Rp 62.483.301.179 yang di peroleh dari akumulasi beban penyusutan tahun 2009 dengan *discount factor* 7% jumlah nilai tunai (*present value*), dengan

menggunakan metode garis lurus sebesar Rp 32.946.615.386 (Penjumlahan beban penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus tahun 2009 dikali dengan *discount factor* sebesar 7%). Dan untuk metode saldo menurun sebesar Rp 58.396.893.281 yang di peroleh dari (Penjumlahan beban penyusutan aset tetap dengan metode saldo menurun tahun 2009 dikali dengan *discount factor* sebesar 7%). Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 25.450.277.895, maka didapat efisiensi beban pajak sebesar Rp 7.126.077.811.

Tabel 19.
PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara
Metode Garis Lurus Dan Saldo Menurun Dengan *Present Value* Tahun 2010
(Dalam Rp)

Jenis Aset	Df 7%	Garis Lurus		Saldo Menurun		Beda Temporer
		Nominal	PV	Nominal	PV	
dan Peralatan	0,9346	46.836.171.549	43.773.085.930	75.540.675.915	70.600.315.710	26.827.229.780
angkutan	0,9346	3.557.346.366	3.324.695.913	5.616.264.762	5.248.961.047	1.924.265.133
ot dan Peralatan Kantor	0,9346	7.858.279.883	7.344.348.379	9.845.338.163	9.201.453.047	1.857.104.668
Total		58.251.797.798	54.442.130.222	91.002.278.840	85.050.729.804	30.608.599.582
Penghematan Pajak = Rp 30.608.599.582 x 25%						7.652.149.895

er: PT Nippon Indosari Corpindo Tbk data diolah penulis)

Dari tabel 19. Dapat dilihat aset yang saat perolehannya dengan garis lurus sebesar Rp 58.251.797.798 dan saldo menurun sebesar Rp 91.002.278.840 yang di peroleh dari akumulasi beban penyusutan tahun 2010 dengan *discount factor* 7% jumlah nilai tunai (*present value*), dengan menggunakan metode garis lurus sebesar Rp 54.442.130.222 (Penjumlahan beban penyusutan aset tetap dengan metode

garis lurus tahun 2010 dikali dengan *discount factor* sebesar 7%). Dan untuk metode saldo menurun sebesar Rp 85.050.729.804 yang di peroleh dari (Penjumlahan beban penyusutan aset tetap dengan metode saldo menurun tahun 2010 dikali dengan *discount factor* sebesar 7%). Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 30.608.599.582, maka didapat efisiensi beban pajak sebesar Rp 7.652.149.895.

Tabel 20.
PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara
Metode Garis Lurus Dan Saldo Menurun Dengan *Present Value* Tahun 2011
(Dalam Rp)

Jenis Aset	Df 7%	Garis Lurus		Saldo Menurun		Beda Temporer
		Nominal	PV	Nominal	PV	
tanah dan peralatan	0,9346	72.429.720.483	67.692.816.763	105.496.223.340	98.596.770.334	30.903.953.571
Pengangkutan	0,9346	4.981.236.537	4.655.463.668	6.838.735.587	6.391.482.279	1.736.018.612
otomotif dan Peralatan Kantor	0,9346	11.837.684.659	11.063.500.053	11.267.442.640	10.530.551.891	-532.948.191
Total		89.248.641.679	83.411.780.513	123.602.401.567	115.518.804.505	32.107.023.991
Penghematan Pajak = Rp. 32.107.023.911 x 25%						8.026.755.998

Sumber: PT Nippon Indosari Corpindo Tbk data diolah penulis)

Dari tabel 20. Dapat dilihat aset yang saat perolehannya dengan garis lurus sebesar Rp 89.248.614.679 dan saldo menurun sebesar Rp 123.602.401.567 yang di peroleh dari akumulasi beban penyusutan tahun 2011 dengan *discount factor* 7% jumlah nilai tunai (*present value*), dengan menggunakan metode garis lurus sebesar Rp 83.411.780.513 (Penjumlahan beban penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus tahun 2011 dikali dengan *discount factor* sebesar

7%). Dan untuk metode saldo menurun sebesar Rp 115.518.804.505 yang di peroleh dari (Penjumlahan beban penyusutan aset tetap dengan metode saldo menurun tahun 2011 dikali dengan *discount factor* sebesar 7%). Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 32.107.023.991, maka didapat efisiensi beban pajak sebesar Rp 8.026.755.998.

Berikut ini adalah penyajian Beban Pajak yang ditanggung oleh perusahaan pada tahun 2008 sampai dengan 2011 sebagai berikut:

Tabel 21.
Beban Pajak
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk Tahun 2008 sampai 2011
(Dalam Rp)

No.	Tahun	Beban Pajak
1.	2008	18.013.019.739
2.	2009	23.376.323.070
3.	2010	34.890.849.054
4.	2011	39.015.501.244

(Sumber: PT Nippon Indosari Corpindo Tbk)

Berdasarkan tabel 21. Dapat disimpulkan bahwa Beban Pajak PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Pada tahun 2008 Rp 18.013.019.739, tahun 2009 sebesar Rp 23.376.323.070, tahun 2010 sebesar Rp 34.890.849.054, dan pada tahun 2011 sebesar Rp 39.015.501.244.

4.2.4. Pengaruh Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan

Pemilihan metode penyusutan haruslah dilakukan dengan benar dan tepat dan mempertimbangkan untung ruginya untuk masa mendatang. Karena itu beban penyusutan harus dialokasikan secara rasional dan sistematis agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang telah berlaku umum. Beban penyusutan aktiva tetap harus dialokasikan sepanjang umur ekonomis aktiva tersebut dalam menghasilkan pendapatan.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan penyusutan dapat meliputi beberapa hal seperti metode penyusutan, kebijakan penentuan umur ekonomis aktiva tetap. Dalam pemilihan metode penyusutan ini bisa dipengaruhi oleh jumlah dan jenis aktiva tetap serta jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pengaruh kebijakan penyusutan aset tetap terhadap Penghasilan Kena Pajak Badan bagi perusahaan yang utamanya bergerak di bidang barang dan jasa yang menggunakan kendaraan, peralatan dan gedung. Akibat penggunaan aset tetap secara terus menerus, maka semua jenis aset tetap (kecuali tanah) akan semakin berkurang kemampuannya dalam memberikan kontribusi bersamaan dengan berlalunya waktu hingga terjadinya penyusutan akan aset tersebut.

Dalam hal ini, penulis melakukan perbandingan antara metode penyusutan garis lurus dan saldo menurun serta besarnya potensi penghematan beban pajak penghasilan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 sebagai berikut:

Tabel 22.
PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
Perbandingan Metode Garis Lurus Dan Saldo Menurun Dengan *Present Value*
dan Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 sampai 2011
(Dalam Rp)

Tahun	Tarif	Metode Penyusutan		Selisih	Penghematan Pajak
		Garis Lurus (PV)	Saldo Menurun (PV)		
2008	30%	12.742.467.035	25.484.934.069	12.742.467.035	3.822.740.110
2009	28%	32.946.615.386	58.396.893.281	25.450.277.895	7.126.077.811
2010	25%	54.442.130.222	85.050.729.804	30.608.599.582	7.652.149.895
2011	25%	83.411.780.513	115.518.804.505	32.107.023.911	8.026.755.998
Total		183.542.993.156	284.451.361.659	100.908.368.503	26.627.728.814

(Sumber: PT Nippon Indosari Corpindo Tbk data diolah penulis)

Perbandingan antara metode garis lurus dan saldo menurun serta penghematan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan dalam menghitung besarnya beban penyusutan. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak tertinggi pada tahun 2008 sebesar 30%, tahun 2009 sebesar 28%, tahun 2010 sebesar 25% dan tahun 2011 sebesar 25%.

Berdasarkan tabel 22. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2008 apabila PT Nippon Indosari Corpindo Tbk dalam pembebanan penyusutan aset tetapnya menggunakan metode garis lurus diperoleh sebesar Rp 12.742.467.035, dan menggunakan metode saldo menurun maka pembebanan penyusutan sebesar Rp 25.484.934.069 yang didapat dari (penjumlahan *present value*) dengan tingkat *discount factor* 9%, sehingga potensi penghematan beban pajak penghasilan sebesar Rp 3.822.740.110.

Tahun 2009 apabila PT Nippon Indosari Corpindo Tbk dalam pembebanan penyusutan aset tetapnya menggunakan metode garis lurus diperoleh sebesar Rp 32.946.615.386, dan menggunakan metode

saldo menurun maka pembebanan penyusutan sebesar Rp 58.396.893.281 yang didapat dari (penjumlahan *present value*) dengan tingkat *discount factor* 7%, sehingga potensi penghematan beban pajak penghasilan sebesar Rp 7.126.077.811.

Tahun 2010 apabila PT Nippon Indosari Corpindo Tbk dalam pembebanan penyusutan aset tetapnya menggunakan metode garis lurus diperoleh sebesar Rp 54.442.130.222 , dan menggunakan metode saldo menurun maka pembebanan penyusutan sebesar Rp 85.050.729.804 yang didapat dari (penjumlahan *present value*) dengan tingkat *discount factor* 7%, sehingga potensi penghematan beban pajak penghasilan sebesar Rp 7.652.149.895.

Tahun 2011 apabila PT Nippon Indosari Corpindo Tbk dalam pembebanan penyusutan aset tetapnya menggunakan metode garis lurus diperoleh sebesar Rp 83.411.780.513 , dan menggunakan metode saldo menurun maka pembebanan penyusutan sebesar Rp 115.518.804.505 yang didapat dari (penjumlahan *present value*) dengan tingkat *discount factor* 7%, sehingga potensi penghematan beban pajak penghasilan sebesar Rp 8.026.755.998.

Adapun efisiensi beban pajak yang dapat dilakukan perusahaan untuk menekan jumlah pajak serendah mungkin dengan tujuan untuk memperoleh laba yang optimal, dibawah ini merupakan perhitungan persentase penghematan terhadap pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 23.
Persentase Penghematan Terhadap Pajak
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
Tahun 2008 sampai dengan 2011
(Dalam Rp)

Tahun	Jumlah Penghematan Pajak	Pajak Penghasilan Terutang	Persentase Penghematan Terhadap pajak
2008	3.822.740.110	18.013.019.739	21,2%
2009	7.126.077.811	23.376.323.070	30,5%
2010	7.652.149.895	34.890.849.054	21,9%
2011	8.026.755.998	39.015.501.244	20,5%

(Sumber: PT Nippon Indosari Corpindo Tbk data diolah penulis)

Dari tabel 23. Dapat diketahui efisiensi beban pajak penghasilan pada tahun 2008 dengan persentase penghematan terhadap pajak jika menggunakan saldo menurun sebesar 21,2%, atau penghematan sebesar Rp3.822.740.110 dan PPh terutang perusahaan menjadi Rp 18.013.019.739, kemudian penghematan pajak jika menggunakan saldo menurun pada tahun 2009 menjadi 30,5% atau sebesar Rp7.126.077.811 dan PPh terutang perusahaan menjadi Rp 2.376.323.070, pada tahun 2010 penghematan pajak jika menggunakan saldo menurun sebesar 21,9% atau penghematan sebesar Rp 7.652.149.895 dan PPh terutang perusahaan menjadi Rp34.890.849.054, lalu tahun 2011 penghematan pajak jika menggunakan saldo menurun menjadi 20,5% atau sebesar Rp8.026.755.998 dan PPh perusahaan sebesar Rp 39.015.501.244.

Maka dalam penentuan metode penyusutan aset tetap berwujud akan berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, karena penyusutan

merupakan beban pengurang bruto yang menentukan besar kecilnya laba kena pajak.

Dalam hal penyusutan penggunaan metode saldo menurun sebagai metode penyusutan aktiva tetap di perusahaan akan jauh lebih baik, dimana hal ini akan menyebabkan biaya pajak yang ditanggung perusahaan akan menurun karena meningkatnya biaya penyusutan yang mengurangi laba kena pajak yang terhutang.

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyusutan aset tetap berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk dalam menghitung penyusutan aset tetap, menggunakan metode garis lurus. Hal ini telah sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6), disebutkan bahwa metode yang diperbolehkan dalam menghitung penyusutan aset tetap adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun.
2. Beban pajak yang terutang setiap tahunnya setelah dilakukan efisiensi perpajakan menurut perusahaan, pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2008 sebesar Rp. 18.013.019.739
 - b. Pada tahun 2009 sebesar Rp. 23.376.323.070
 - c. Pada tahun 2010 sebesar Rp. 34.890.849.054
 - d. Pada tahun 2011 sebesar Rp. 39.015.501.244

3. Setelah dihitung kembali dengan metode penyusutan saldo menurun, penghematan pajak pada perusahaan sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Penghematan Pajak	Pajak Penghasilan Terutang	Persentase Penghematan Terhadap pajak
2008	3.822.740.110	18.013.019.739	21,2%
2009	7.126.077.811	23.376.323.070	30,5%
2010	7.652.149.895	34.890.849.054	21,9%
2011	8.026.755.998	39.015.501.244	20,5%

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, maka penulis dapat menyampaikan saran yaitu untuk dapat mempertimbangkan menggunakan metode penyusutan saldo menurun pada kelompok aset tetap berwujud bukan bangunan seperti mesin dan peralatan, alat pengangkutan, serta perabot dan peralatan kantor, karena dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun dapat memberikan penghematan pajak bagi perusahaan.

JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Bulan												Agt	Sep	Okt	Nov	Des
		Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli					
1	Pengajuan Judul	****																
2	Studi Pustaka	***																
3	Pembuatan Makalah Seminar		****	****														
4	Seminar				*		*											
5	Pengesahan							**										
6	Pengumpulan Data								****	****	****							
7	Pengolahan Data								****	****	****							
8	Penulisan Laporan dan Bimbingan								****	****	****	****	****	****	****	****		
9	Sidang Skripsi																*	
10	Penyempurnaan Skripsi																**	
11	Pengesahan																	*

Keterangan : *) Menunjukkan Minggu ke-

DAFTAR PUSTAKA

- Dermawan Sjahrial. 2008. *Manajemen Keuangan*. Edisi 2, Mitra Wacana, Jakarta.
- Dermawan Sjahrial. 2008. *Kumpulan pembahasan soal-soal manajemen keuangan*. Mitra Wacana, Jakarta.
- Erly Suandy. 2008. *Perencanaan Pajak*. Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.
- Gunadi. 2009. *Akuntansi Pajak, sesuai dengan undang-undang pajak baru*. Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesian, Jakarta.
- Herry Purwono. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga, Jakarta.
- [http://www.pajak.com/index.php?option=com_forum
&Itemid=100&func=view&catid=21&id=457](http://www.pajak.com/index.php?option=com_forum&Itemid=100&func=view&catid=21&id=457).
- <http://www.sarjanaku.com/2012/07/pengertian-aktiva-tetap-penggolongan.html>.
- <http://www.scribd.com/doc/36537963/22/Metode-Analisa-Data>.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Johanes Yahya. 2010. *Akuntansi Perpajakan: Pos-pos Neraca Sesuai Peraturan Perpajakan yang Berlaku*. Edisi Pertama. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Keown Atrhur., dan John Martin. 2008. *Manajemen Keuangan: Prinsip dan Penerapan*. PT Indeks, Jakarta.
- Lubis, Irwansyah. 2009. *Akuntansi dan Pelaporan Pajak*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Lubis, Irwansyah. 2009. *Manajemen dan Analisis, Memudahkan Urusan Pajak*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Andi, Yogyakarta.

- Moh Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mulyo Agung. 2011. *Perpajakan Indonesia Seri PPh dan Badan*. Edisi 3, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Rudianto. 2008. *Pengantar Akuntansi*. Erlangga, Jakarta.
- Sedarmayanti., dan Syarifudin. 2011. *Metode Penelitian*. Mandar Maju, Bandung.
- Sukrisno Agoes., dan Estralita Trisnawati. 2009. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sulistyo Basuki. 2010. *Metode Penelitian*. Penaku, Jakarta.
- Thomas Sumarsan. 2012. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru*. Edisi 2, PT Indeks, Jakarta.
- Tulis S. Meliala., dan Fransisca Widiyanto Oetomo. 2008. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Penerbit Semesta Media, Jakarta.
- Undang-undang Pajak Lengkap. 2010. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia, Akuntansi Pajak*. Cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak*. Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 9, Salemba Empat, Jakarta.

**Penyusutan Aset Tetap Dengan Metode Garis Lurus
PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
Tahun 2008**

No	Jenis Aset	Nilai Perolehan	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif	Beban Penyusutan Tahun 2008
	Bangunan					
1	Bangunan	46,292,894,131	Permanen	20 Tahun	5%	2,314,644,707
	Bukan Bangunan					
2	Mesin dan peralatan	85,810,522,074	Kelompok II	8 Tahun	12.5%	10,726,315,259
3	Alat Pengangkutan	8,091,184,550	Kelompok II	8 Tahun	12.5%	1,011,398,069
4	Perabot dan Peralatan Kantor	8,608,191,967	Kelompok I	4 Tahun	25.0%	2,152,047,992
	Total	148,802,792,722				16,204,406,026

**Penyusutan Aset Tetap Dengan Metode Saldo Menurun
PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
Tahun 2008**

No	Jenis Aset	Nilai Perolehan	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif	Beban Penyusutan Tahun 2008
1	Mesin dan peralatan	85,810,522,074	Kelompok II	8 Tahun	25%	21,452,630,519
2	Alat Pengangkutan	8,091,184,550	Kelompok II	4 Tahun	25%	2,022,796,138
3	Perabot dan Peralatan Kantor	8,608,191,967	Kelompok I	8 Tahun	50%	4,304,095,984
	Total	102,509,898,591				27,779,522,640

Lampiran I

PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
Perbandingan Beban Penyusutan Aset Tetap antara
Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan Present Value sebesar 9%
Pada Tahun 2008

Jenis Aset	Df 9%	Garis Lurus		Saldo menurun		Beda Temporer
		Nominal	PV	Nominal	PV	
Mesin dan peralatan	0.9174	10,726,315,259	9,840,321,619	21,452,630,519	19,680,643,238	9,840,321,619
Alat Pengangkutan	0.9174	1,011,398,069	927,856,588	2,022,796,138	1,855,713,177	927,856,588
Perabot dan Peralatan Kantor	0.9174	2,152,047,992	1,974,288,828	4,304,095,984	3,948,577,655	1,974,288,828
Total		13,889,761,320	12,742,467,035	27,779,522,640	25,484,934,069	12,742,467,035
Penghematan Pajak = Rp.12.742.467.035 x 30%						3,822,740,110

Lampiran II

Penyusutan Aset Tetap Dengan Metode Garis Lurus
PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
Tahun 2009

No	Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Nilai Perolehan	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif	Beban Penyusutan Tahun 2008	Beban Penyusutan Tahun 2009	Akumulasi Penyusutan
	Bangunan								
1	Bangunan	77,182,265,063	123,475,159,194	Permanen	20 Tahun	5%	2,314,644,707	3,859,113,253	6,173,757,960
	Bukan Bangunan								
2	Mesin dan peralatan	139,938,261,305	225,748,783,379	Kelompok II	8 Tahun	12.5%	10,726,315,259	17,492,282,663	28,218,597,922
3	Alat Pengangkutan	9,815,274,550	17,906,459,100	Kelompok II	8 Tahun	12.5%	1,011,398,069	1,226,909,319	2,238,307,388
4	Perabot dan Peralatan Kantor	10,572,598,462	19,180,790,429	Kelompok I	4 Tahun	25.0%	2,152,047,992	2,643,149,616	4,795,197,607
	Total	237,508,399,380	386,311,192,102				16,204,406,026	25,221,454,851	41,425,860,877

Penyusutan Aset Tetap Dengan Metode Saldo Menurun
PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
Tahun 2009

No	Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Nilai Perolehan	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif	Beban Penyusutan Tahun 2008	Beban Penyusutan Tahun 2009	Akumulasi Penyusutan
1	Mesin dan peralatan	139,938,261,305	225,748,783,379	Kelompok II	8 Tahun	25%	16,089,472,889	34,984,565,326	51,074,038,215
2	Alat Pengangkutan	9,815,274,550	17,906,459,100	Kelompok II	8 Tahun	25%	1,517,097,103	2,453,818,638	3,970,915,741
3	Perabot dan Peralatan Kantor	10,572,598,462	19,180,790,429	Kelompok I	4 Tahun	50%	2,152,047,992	5,286,299,231	7,438,347,223
	Total	160,326,134,317	262,836,032,908				19,758,617,984	42,724,683,195	62,483,301,179

Lampiran III

PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
Perbandingan Beban Penyusutan Aset Tetap antara
Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan Present Value sebesar 7%
Pada Tahun 2009

Jenis Aset	Df 7%	Garis Lurus		Saldo menurun		Beda Temporer
		Nominal	PV	Nominal	PV	
Mesin dan peralatan	0.9346	28,218,597,922	26,373,101,618	51,074,038,215	47,733,796,116	21,360,694,498
Alat Pengangkutan	0.9346	2,238,307,388	2,091,922,084	3,970,915,741	3,711,217,851	1,619,295,767
Perabot dan Peralatan Kantor	0.9346	4,795,197,607	4,481,591,684	7,438,347,223	6,951,879,314	2,470,287,631
Total		35,252,102,917	32,946,615,386	62,483,301,179	58,396,893,281	25,450,277,895
Penghematan Pajak = Rp. 25,450,277,895x 28%						7,126,077,811

Lampiran IV

Penyusutan Aset Tetap Dengan Metode Garis Lurus
PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
Tahun 2010

No	Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Nilai Perolehan	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif	Beban Penyusutan Tahun 2008	Beban Penyusutan Tahun 2009	Beban Penyusutan Tahun 2010	Akumulasi Penyusutan
	Bangunan									
1	Bangunan	80,504,278,612	203,979,437,806	Permanen	20 Tahun	5%	2,314,644,707	3,859,113,253	4,025,213,931	10,198,971,890
	Bukan Bangunan									
2	Mesin dan peralatan	148,940,589,015	374,689,372,394	Kelompok II	8 Tahun	12.5%	10,726,315,259	17,492,282,663	18,617,573,627	46,836,171,549
3	Alat Pengangkutan	10,552,311,826	28,458,770,926	Kelompok II	8 Tahun	12.5%	1,011,398,069	1,226,909,319	1,319,038,978	3,557,346,366
4	Perabot dan Peralatan Kantor	12,252,329,103	31,433,119,532	Kelompok I	4 Tahun	25.0%	2,152,047,992	2,643,149,616	3,063,082,276	7,858,279,883
	Total	252,249,508,556	638,560,700,658				16,204,406,026	25,221,454,851	27,024,908,811	68,450,769,688

Penyusutan Aset Tetap Dengan Metode Saldo Menurun
PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
Tahun 2010

No	Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Nilai Perolehan	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif	Beban Penyusutan Tahun 2008	Beban Penyusutan Tahun 2009	Beban Penyusutan Tahun 2010	Akumulasi Penyusutan
1	Mesin dan peralatan	148,940,589,015	374,689,372,394	Kelompok II	8 Tahun	25%	12,067,104,667	26,238,423,995	37,235,147,254	75,540,675,915
2	Alat Pengangkutan	10,552,311,826	28,458,770,926	Kelompok II	4 Tahun	25%	1,137,822,827	1,840,363,978	2,638,077,957	5,616,264,762
3	Perabot dan Peralatan Kantor	12,252,329,103	31,433,119,532	Kelompok I	8 Tahun	50%	1,076,023,996	2,643,149,616	6,126,164,552	9,845,338,163
	Total	171,745,229,944	434,581,262,852				14,280,951,490	30,721,937,588	45,999,389,762	91,002,278,840

Lampiran V

PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
Perbandingan Beban Penyusutan Aset Tetap antara
Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan Present Value sebesar 7%
Pada Tahun 2010

Jenis Aset	Df 7%	Garis Lurus		Saldo menurun		Beda Temporer
		Nominal	PV	Nominal	PV	
Mesin dan peralatan	0.9346	46,836,171,549	43,773,085,930	75,540,675,915	70,600,315,710	26,827,229,780
Alat Pengangkutan	0.9346	3,557,346,366	3,324,695,913	5,616,264,762	5,248,961,047	1,924,265,133
Perabot dan Peralatan Kantor	0.9346	7,858,279,883	7,344,348,379	9,845,338,163	9,201,453,047	1,857,104,668
Total		58,251,797,798	54,442,130,222	91,002,278,840	85,050,729,804	30,608,599,582
Penghematan Pajak = Rp. 30,608,599,582 x 25%						7,652,149,895

Lampiran VI

Penyusutan Aset Tetap Dengan Metode Garis Lurus
PT. Nippon Indonesia Corpindo Tbk

Tahun 2011

No	Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Nilai Perolehan	Kelompok Harta Bervajud	Masa Manfaat	Tarif	Beban Penyusutan Tahun 2008	Beban Penyusutan Tahun 2009	Beban Penyusutan Tahun 2010	Beban Penyusutan Tahun 2011	Akumulasi Penyusutan
	Bangunan	98.649.307,363	302.628.745,169	Perumahan	20 Tahun	5%	2.314.644,707	3.859.113,233	4.025.213,931	4.932.465,368	15.131.437,258
	Bahan Bangunan										
2	Mesin dan peralatan	204.748.391,468	579.437.763,862	Kelompok II	8 Tahun	12,5%	10.726.315,259	17.492.282,663	18.617.573,627	25.593.548,934	72.429.720,483
3	Alat Pengeruk	11.391.121,371	39.849.892,297	Kelompok II	8 Tahun	12,5%	1.011.398,069	1.226.909,319	1.319.038,978	1.423.890,171	4.981.236,537
4	Peralatan Kantor	15.917.619,105	47.350.738,637	Kelompok I	4 Tahun	25,0%	2.152.047,992	2.643.149,616	3.063.082,276	3.979.404,776	11.837.684,659
	Total	330.706.439,307	969.267.139,965				16.204.406,026	25.221.454,851	27.024.908,811	35.929.309,249	104.380.078,938

Penyusutan Aset Tetap Dengan Metode Saldo Menurun
PT. Nippon Indonesia Corpindo Tbk

Tahun 2011

No	Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Nilai Perolehan	Kelompok Harta Bervajud	Masa Manfaat	Tarif	Beban Penyusutan Tahun 2008	Beban Penyusutan Tahun 2009	Beban Penyusutan Tahun 2010	Beban Penyusutan Tahun 2011	Akumulasi Penyusutan
	Mesin dan peralatan	204.748.391,468	579.437.763,862	Kelompok II	8 Tahun	25%	6.703.947,037	19.678.817,996	27.926.360,440	51.187.097,867	105.496.223,340
2	Alat Pengeruk	11.391.121,371	39.849.892,297	Kelompok II	8 Tahun	25%	632.123,793	1.380.272,984	1.978.538,467	2.847.780,343	6.838.735,587
3	Peralatan Kantor	15.917.619,105	47.350.738,637	Kelompok I	4 Tahun	50%	-1.076.023,996	1.321.574,808	3.063.082,276	7.958.809,553	11.267.442,640
	Total	232.057.131,944	666.638.394,796				6.260.046,834	22.380.665,787	32.968.001,183	61.993.687,762	123.602.401,567

PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
Perbandingan Beban Penyusutan Aset Tetap antara
Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan Present Value sebesar 7%
Pada Tahun 2011

Jenis Aset	Df 7%	Garis Lurus		Saldo menurun		Beda Temporer
		Nominal	PV	Nominal	PV	
Mesin dan peralatan	0.9346	72,429,720,483	67,692,816,763	105,496,223,340	98,596,770,334	30,903,953,571
Alat Pengangkutan	0.9346	4,981,236,537	4,655,463,668	6,838,735,587	6,391,482,279	1,736,018,612
Perabot dan Peralatan Kantor	0.9346	11,837,684,659	11,063,500,083	11,267,442,640	10,530,551,891	-532,948,191
Total		89,248,641,679	83,411,780,513	123,602,401,567	115,518,804,505	32,107,023,991
Penghematan Pajak = Rp. 32,107,023,911 x 25%						8,026,755,998

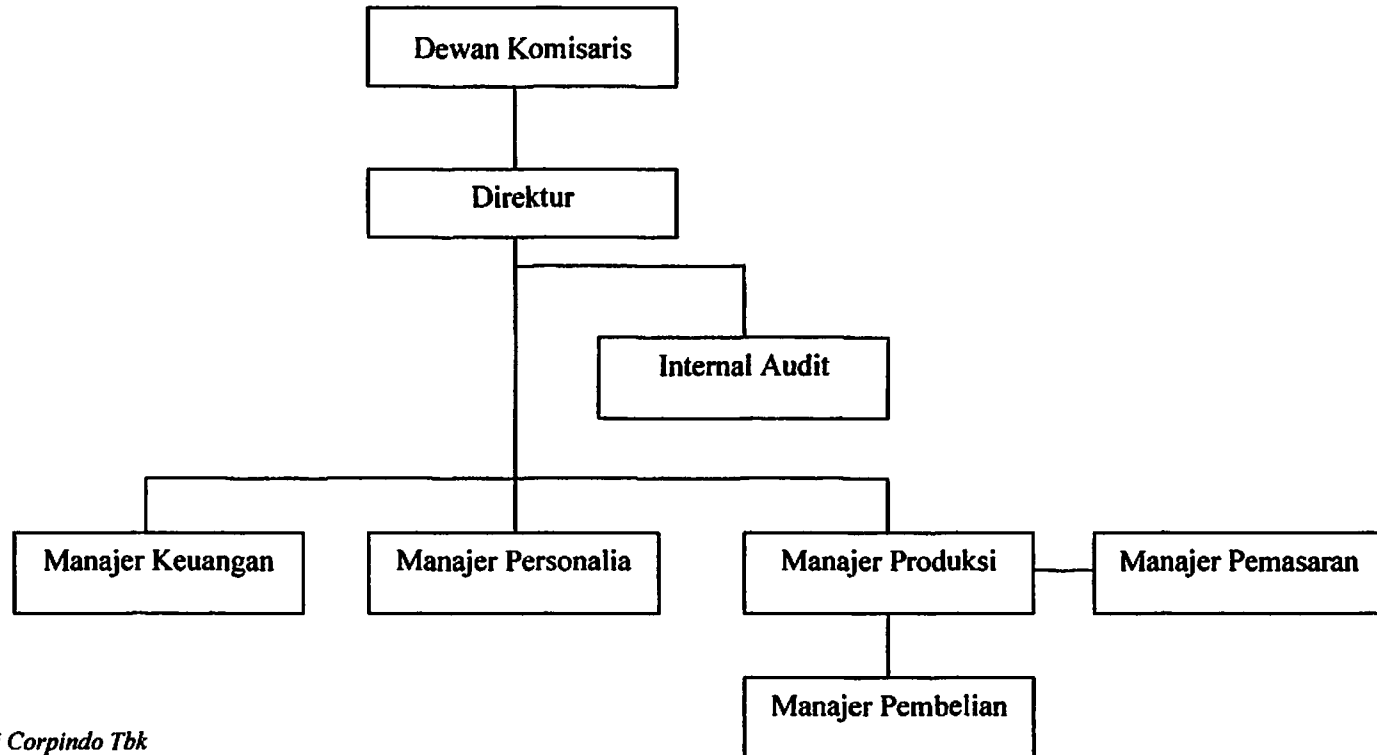
Lampiran VIII

Tabel Discount Factor

Year	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434	0.9346	0.9259	0.9174	0.9091	0.9009	0.8929	0.8850	0.8772	0.8696
2	0.9426	0.9246	0.9070	0.8900	0.8734	0.8573	0.8417	0.8264	0.8116	0.7972	0.7831	0.7695	0.7561
3	0.9151	0.8890	0.8638	0.8396	0.8163	0.7938	0.7722	0.7513	0.7312	0.7118	0.6931	0.6750	0.6575
4	0.8885	0.8548	0.8227	0.7921	0.7629	0.7350	0.7084	0.6830	0.6587	0.6355	0.6133	0.5921	0.5718
5	0.8626	0.8219	0.7835	0.7473	0.7130	0.6806	0.6499	0.6209	0.5935	0.5674	0.5428	0.5194	0.4972
6	0.8375	0.7903	0.7462	0.7050	0.6663	0.6302	0.5963	0.5645	0.5346	0.5066	0.4803	0.4556	0.4323
7	0.8131	0.7599	0.7107	0.6651	0.6227	0.5835	0.5470	0.5132	0.4817	0.4523	0.4251	0.3996	0.3759
8	0.7894	0.7307	0.6768	0.6274	0.5820	0.5403	0.5019	0.4665	0.4339	0.4039	0.3762	0.3506	0.3269
9	0.7664	0.7026	0.6446	0.5919	0.5439	0.5002	0.4604	0.4241	0.3909	0.3606	0.3329	0.3075	0.2843
10	0.7441	0.6756	0.6139	0.5584	0.5083	0.4632	0.4224	0.3855	0.3522	0.3220	0.2946	0.2697	0.2472
11	0.7224	0.6496	0.5847	0.5268	0.4751	0.4289	0.3875	0.3505	0.3173	0.2875	0.2607	0.2366	0.2149
12	0.7014	0.6246	0.5568	0.4970	0.4440	0.3971	0.3555	0.3186	0.2858	0.2567	0.2307	0.2076	0.1869
13	0.6810	0.6006	0.5303	0.4688	0.4150	0.3677	0.3262	0.2897	0.2575	0.2292	0.2042	0.1821	0.1625
14	0.6611	0.5775	0.5051	0.4423	0.3878	0.3405	0.2992	0.2633	0.2320	0.2046	0.1807	0.1597	0.1413
15	0.6419	0.5553	0.4810	0.4173	0.3624	0.3152	0.2745	0.2394	0.2090	0.1827	0.1599	0.1401	0.1229
16	0.6232	0.5339	0.4581	0.3936	0.3387	0.2919	0.2519	0.2176	0.1883	0.1631	0.1415	0.1229	0.1069
17	0.6050	0.5134	0.4363	0.3714	0.3166	0.2703	0.2311	0.1978	0.1696	0.1456	0.1252	0.1078	0.0929
18	0.5874	0.4936	0.4155	0.3503	0.2959	0.2502	0.2120	0.1799	0.1528	0.1300	0.1108	0.0946	0.0808
19	0.5703	0.4746	0.3957	0.3305	0.2765	0.2317	0.1945	0.1635	0.1377	0.1161	0.0981	0.0829	0.0703
20	0.5537	0.4564	0.3769	0.3118	0.2584	0.2145	0.1784	0.1486	0.1240	0.1037	0.0868	0.0728	0.0611

Lampiran IX

**Lampiran X.
Struktur Organisasi
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk**



*Sumber: PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
Tahun: 2008*

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2009, 2008 dan 2007
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009, 2008 and 2007
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

6. FIXED ASSETS

The details of fixed assets are as follows:

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Pertambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Perubahan 2009						2009 Movements
Biaya Perolehan						Cost
Hak atas tanah	14.262.560.216	-	-	-	14.262.560.216	Landrights
Bangunan dan pengembangan	77.162.263.063	2.381.345.689	-	940.667.560	80.504.278.612	Buildings and improvements
Mesin dan peralatan	139.938.261.305	9.002.327.710	-	-	148.940.589.015	Machinery and equipment
Alat pengangkutan	8.815.274.580	1.413.790.000	676.722.724	-	10.552.311.826	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	10.572.599.462	1.728.575.979	48.848.338	-	12.252.329.103	Furniture, fixtures and office equipment
Aset dalam penyelesaian	712.460.758	5.344.268.985	-	(940.667.560)	8.116.062.183	Constructions in progress
Jumlah	252.483.426.354	19.870.278.683	726.868.082	-	271.828.138.953	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan dan pengembangan	11.148.044.921	3.931.186.348	-	-	15.079.231.267	Buildings and improvements
Mesin dan peralatan	28.643.316.583	9.483.600.172	-	-	38.027.116.755	Machinery and equipment
Alat pengangkutan	5.908.937.382	1.421.635.977	622.658.057	-	8.705.917.302	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	5.454.355.968	1.727.819.197	47.178.668	-	7.134.986.397	Furniture, fixtures and office equipment
Jumlah	51.052.934.754	16.554.441.692	669.734.725	-	66.947.261.721	Total
Nilai Buku	201.430.491.600				204.880.877.234	Net Book Value
Perubahan 2008						2008 Movements
Biaya Perolehan						Cost
Hak atas tanah	14.262.560.216	-	-	-	14.262.560.216	Landrights
Bangunan dan pengembangan	48.292.694.131	245.539.030	-	30.643.631.902	77.162.263.063	Buildings and improvements
Mesin dan peralatan	85.810.822.074	3.051.467.477	111.375.500	51.187.647.254	139.938.261.305	Machinery and equipment
Alat pengangkutan	8.091.184.580	1.754.340.000	30.250.000	-	9.815.274.580	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	8.608.191.967	1.673.603.865	71.285.470	-	10.572.599.462	Furniture, fixtures and office equipment
Aset dalam penyelesaian	890.632.303	82.015.375.711	-	(82.193.547.256)	712.460.758	Constructions in progress
Jumlah	163.663.983.341	88.740.328.633	212.690.970	-	252.483.426.354	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan dan pengembangan	8.796.292.668	2.361.752.335	-	-	11.148.044.921	Buildings and improvements
Mesin dan peralatan	22.801.715.432	5.787.388.858	45.787.705	-	28.643.316.583	Machinery and equipment
Alat pengangkutan	4.716.905.773	1.220.181.609	30.250.000	-	5.908.937.382	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	4.141.775.423	1.381.781.581	69.181.136	-	5.454.355.968	Furniture, fixtures and office equipment
Jumlah	40.456.689.214	10.741.064.381	145.218.841	-	51.052.934.754	Total
Nilai Buku	123.489.294.027				201.430.988.000	Net Book Value
Perubahan 2007						2007 Movements
Biaya Perolehan						Cost
Hak atas tanah	7.122.560.216	2.380.000.000	-	4.760.000.000	14.262.560.216	Landrights
Bangunan dan pengembangan	44.868.698.748	1.323.687.383	-	-	48.292.694.131	Buildings and improvements
Mesin dan peralatan	77.311.900.935	6.319.271.134	82.749.995	272.160.000	85.810.622.074	Machinery and equipment
Alat pengangkutan	6.883.954.550	1.221.840.000	258.450.000	141.840.000	8.091.184.580	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	5.898.441.651	903.794.114	303.643.768	2.049.600.000	8.608.191.967	Furniture, fixtures and office equipment
Aset dalam penyelesaian	2.450.640.000	5.663.632.303	-	(7.223.640.000)	890.632.303	Constructions in progress
Jumlah	144.797.204.100	19.811.624.934	632.943.793	-	163.663.983.341	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan dan pengembangan	6.542.219.494	2.254.073.092	-	-	8.796.292.668	Buildings and improvements
Mesin dan peralatan	17.549.698.743	5.262.730.383	30.711.704	-	22.801.715.432	Machinery and equipment
Alat pengangkutan	3.909.843.023	1.063.112.470	253.849.720	-	4.716.905.773	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	3.355.017.721	1.064.778.720	278.021.018	-	4.141.775.423	Furniture, fixtures and office equipment
Jumlah	31.366.678.981	9.684.694.676	564.582.442	-	40.456.689.214	Total
Nilai Buku	113.440.627.119				123.489.294.027	Net Book Value

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Years Ended
 December 31, 2009, 2008 and 2007
 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

9. TAXATION (continued)

	2009	2008	2007	
Pengaruh pajak atas beda tetap:				<i>Tax effects on permanent differences:</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan				<i>Non-deductible expenses</i>
Beban bunga	838.254.685	258.142.680	18.715.908	<i>Interest expense</i>
Sewa kendaraan	314.692.000	324.180.000	224.280.000	<i>Vehicle rental</i>
Asuransi	41.300.000	28.936.982	101.002.955	<i>Insurance</i>
Komunikasi	40.320.000	34.380.000	29.550.000	<i>Communications</i>
Rapat dan konferensi	14.014.528	26.519.401	39.469.722	<i>Meetings and conferences</i>
Pajak pertambahan nilai yang tidak dapat dikreditkan	-	16.369.999	22.851.428	<i>Non-creditable value added taxes</i>
Lain-lain	297.442.960	272.895.005	193.608.248	<i>Others</i>
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(371.935.054)	(198.245.940)	(51.006.900)	<i>Interest income already subjected to final tax</i>
Dampak perubahan tarif pajak	(335.296.540)	(859.161.789)	-	<i>Impact of change in tax rates</i>
Beban pajak penghasilan	23.376.323.070	18.013.019.739	8.420.719.958	<i>Income tax expense</i>

f. Aset (kewajiban) pajak tangguhan terdiri dari:

f. Deferred tax asset (liability) consists of the following:

	2009	2008	2007	
Aset pajak tangguhan				<i>Deferred tax asset</i>
Taksiran kewajiban imbalan kerja	982.248.414	702.620.429	580.765.363	<i>Estimated liability for employee benefits</i>
Kewajiban pajak tangguhan				<i>Deferred tax liability</i>
Aset tetap	(7.572.735.438)	(5.897.453.343)	(5.839.726.938)	<i>Fixed assets</i>
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	(6.590.489.024)	(5.194.832.914)	(5.048.971.575)	<i>Deferred tax liability - net</i>

Pada bulan September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" diubah untuk keempat kalinya dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya. Perusahaan mengakui dampak perubahan tarif pajak sebesar Rp335.296.540 dan Rp859.161.789 dalam perhitungan aset dan kewajiban pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, yang dicatat sebagai pengurang beban pajak tangguhan tahun 2009 dan 2008.

In September 2008, Law No. 7 Year 1983 regarding "Income Tax" has been revised for the fourth time with the issuance of Law No. 36 Year 2008. The revised Law stipulates changes in the corporate tax rates from progressive tax rates to a single rate of 28% for fiscal year 2009 and 25% for fiscal years 2010 onwards. The Company recognized the effects of these rate changes amounting to Rp335,296,540 and Rp859,161,789 in the computation of deferred tax asset and liability as of December 31, 2009 and 2008 which are deducted from deferred income tax expense in 2009 and 2008, respectively.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2011 and 2010
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

7. ASET TETAP

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

7. FIXED ASSETS

The details of fixed assets are as follows:

	1 Januari 2011/ January 1, 2011	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember 2011/ December 31, 2011	
Biaya Perolehan						Cost
Tanah	30.010.416.216	208.136.792	-	3.955.600.000	34.172.153.008	Land
Bangunan dan pengembangan	98.849.370.363	41.298.017.643	-	25.201.800.501	114.945.587.450	Buildings and improvements
Mesin dan peralatan	204.748.391.468	88.668.741.188	-	18.409.719.437	311.007.413.223	Machinery and equipment
Alat pengangkutan	11.391.121.371	3.177.018.000	401.250.000	-	14.166.889.371	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	15.917.819.105	14.940.303.093	865.341.598	2.200.000	29.994.780.600	Furniture, fixtures and office equipment
Aset dalam penyelesaian	71.589.082.347	75.913.822.896	-	(47.669.318.856)	99.733.586.387	Assets under construction
Total	432.106.000.870	224.224.039.722	1.266.591.598	-	653.063.448.994	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan dan pengembangan	19.654.787.265	7.428.265.442	-	-	27.083.052.707	Buildings and improvements
Mesin dan peralatan	49.868.891.288	10.037.363.682	-	-	59.906.254.970	Machinery and equipment
Alat pengangkutan	7.544.041.056	1.733.717.254	398.200.000	-	8.879.558.312	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	9.172.813.431	4.705.027.141	781.646.448	-	13.096.194.124	Furniture, fixtures and office equipment
Total	86.240.313.042	23.904.413.719	1.179.846.448	-	108.964.690.313	Total
Nilai Buku	345.865.687.828				544.098.758.681	Net Book Value
	1 Januari 2010/ January 1, 2010	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember 2010/ December 31, 2010	
Biaya Perolehan						Cost
Tanah	14.262.560.216	15.858.380.000	1.080.978.000	1.170.452.000	30.010.416.216	Land
Bangunan dan pengembangan	80.504.278.612	14.914.175.438	-	3.230.916.313	98.649.370.363	Buildings and improvements
Mesin dan peralatan	148.940.589.015	54.584.216.384	78.500.000	1.300.088.069	204.748.391.468	Machinery and equipment
Alat pengangkutan	10.852.311.828	1.605.915.909	778.806.364	11.700.000	11.391.121.371	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	12.252.329.103	3.239.824.077	165.839.875	591.305.800	15.917.819.105	Furniture, fixtures and office equipment
Aset dalam penyelesaian	5.116.062.183	72.577.460.346	-	(6.304.460.182)	71.389.082.347	Assets under construction
Total	271.828.130.936	162.879.992.184	2.102.122.239	-	432.106.000.870	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan dan pengembangan	15.079.231.267	4.575.535.998	-	-	19.654.767.265	Buildings and improvements
Mesin dan peralatan	38.027.118.755	11.850.582.866	8.808.333	-	49.868.891.288	Machinery and equipment
Alat pengangkutan	6.705.917.302	1.612.100.120	773.978.384	-	7.544.041.056	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	7.134.998.397	2.199.681.491	182.044.457	-	9.172.813.431	Furniture, fixtures and office equipment
Total	66.947.261.721	20.237.899.475	944.829.154	-	86.240.313.042	Total
Nilai Buku	204.880.869.234				345.865.687.828	Net Book Value

Mulai tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan mengubah taksiran masa manfaat atas mesin dan peralatan dan perabot dan peralatan kantor (Catatan 2e).

Starting January 1, 2011, the Company changed the estimated useful lives of machinery and equipment and furniture, fixtures and office equipment (Note 2e).

Sebagai dampak dari perubahan tersebut, laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan meningkat sebesar Rp12.098.363.461 pada tahun 2011. Sebagai tambahan, perubahan tersebut juga akan mengakibatkan kenaikan yang berkisar antara Rp222.879.238 sampai dengan Rp9.003.774.054 terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan pada setiap tahun mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2024 dan mengakibatkan penurunan yang berkisar antara Rp1.051.771.393 sampai dengan Rp10.961.391.328 terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan pada setiap tahun mulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2036.

As a result from the change, the Company's income before tax in 2011 has increased by Rp12,098,363,461. Additionally, the change will result an increase ranging from Rp222,879,238 to Rp9,003,774,054 to the Company's income before tax for each year starting from 2012 to 2024 and a decrease ranging from Rp1,051,771,393 to Rp10,961,391,328 to the Company's income before tax for each year starting from 2025 to 2036.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
 31 Desember 2011 dan 2010
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Years Ended December 31, 2011 and 2010
 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

c. Rincian beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

c. The details of income tax expense are as follows:

	2011	2010	
Beban pajak penghasilan - kini	35.975.163.500	33.532.522.500	<i>Income tax expense - current</i>
Beban (manfaat) pajak tangguhan:			<i>Deferred income tax expense (benefit):</i>
Penyusutan aset tetap	4.412.676.203	1.905.420.151	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Penyisihan imbalan kerja-neto	(1.372.338.459)	(547.093.597)	<i>Provision for employee benefits - net</i>
Neto	3.040.337.744	1.358.326.554	<i>Net</i>
Beban pajak penghasilan	39.015.501.244	34.890.849.054	<i>Income tax expense</i>

d. Perhitungan taksiran utang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

d. The computation of estimated income tax payable is as follows:

	2011	2010	
Beban pajak penghasilan - kini	35.975.163.500	33.532.522.500	<i>Income tax expense - current</i>
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka			<i>Less prepayments of income taxes</i>
Pasal 22	3.455.060.278	1.085.412.746	<i>Article 22</i>
Pasal 25	29.579.282.076	19.195.096.590	<i>Article 25</i>
Total pajak penghasilan dibayar di muka	33.034.342.354	20.280.509.336	<i>Total prepayments of income taxes</i>
Taksiran utang pajak penghasilan	2.940.821.146	13.252.013.164	<i>Estimated income tax payable</i>

e. Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku yang besarnya 25% atas laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

e. The reconciliation between income tax expense calculated by applying the applicable tax rate of 25% to the income before income tax and the income tax expense as shown in the statements of comprehensive income for the years ended December 31, 2011 and 2010 is as follows: